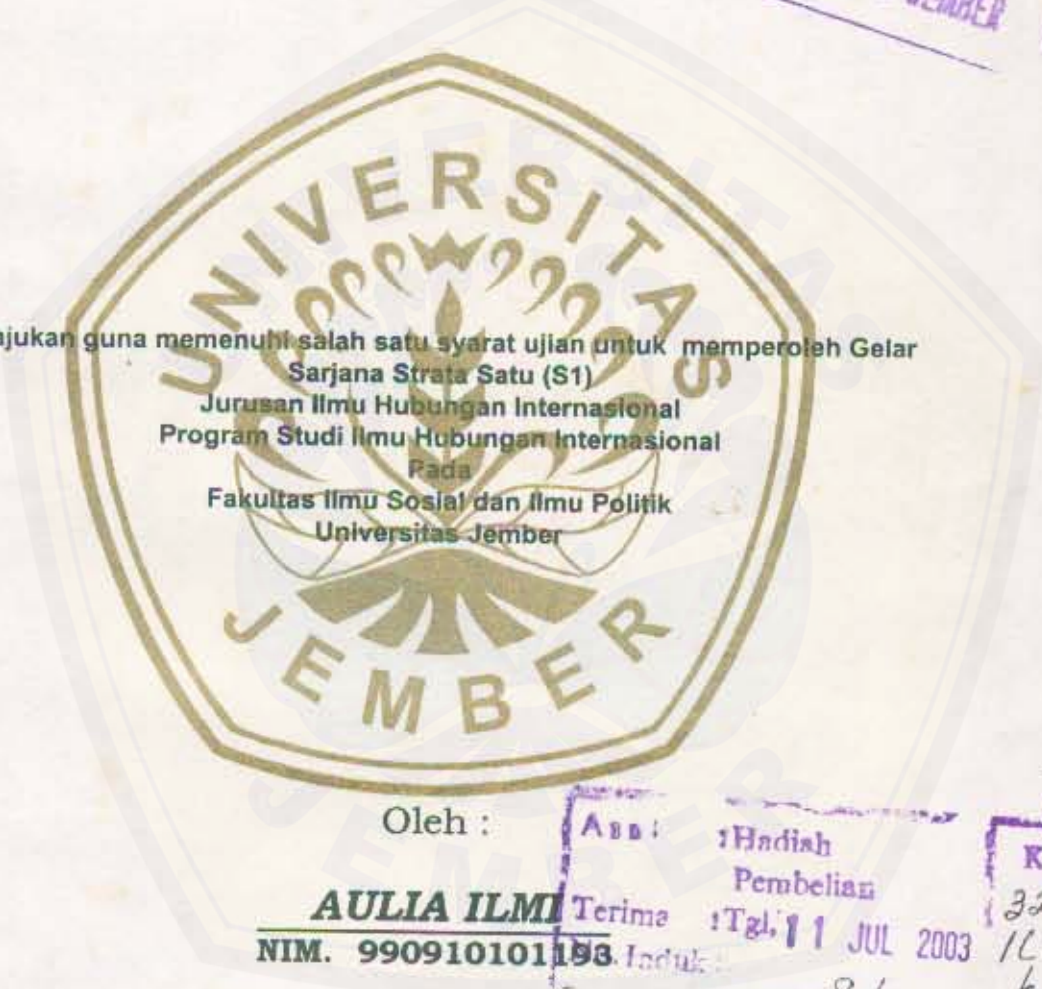


KERJASAMA UNI EROPA-AMERIKA SERIKAT  
PASCA PERJANJIAN MAASTRICHT



SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat ujian untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Rada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Oleh :

**AULIA ILMU**  
NIM. 990910101198

Abd :  
: Hadiah  
Pembelian  
: Tgl. 11 JUL 2003

9  
Klass  
327  
ILM  
ker

Dosen Pembimbing :  
**Drs. ASRIAL AZIZ**  
NIP. : 130 355 413

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2003

## MOTTO

*"Ya Allah, ya Tuhan kami,  
janganlah Engkau sesatkan hati kami  
setelah Engkau memberi petunjuk pada kami.  
Karuniakanlah kami dengan rahmat-Mu.  
Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah."*

(riwayat HR Muslim)

*Allah telah memberi pengetahuan,  
agar dengan terangnya  
engkau bukan saja dapat menyembah-Nya,  
melainkan juga melihat dirimu sendiri  
didalam kelemahan dan kekuatanmu.*

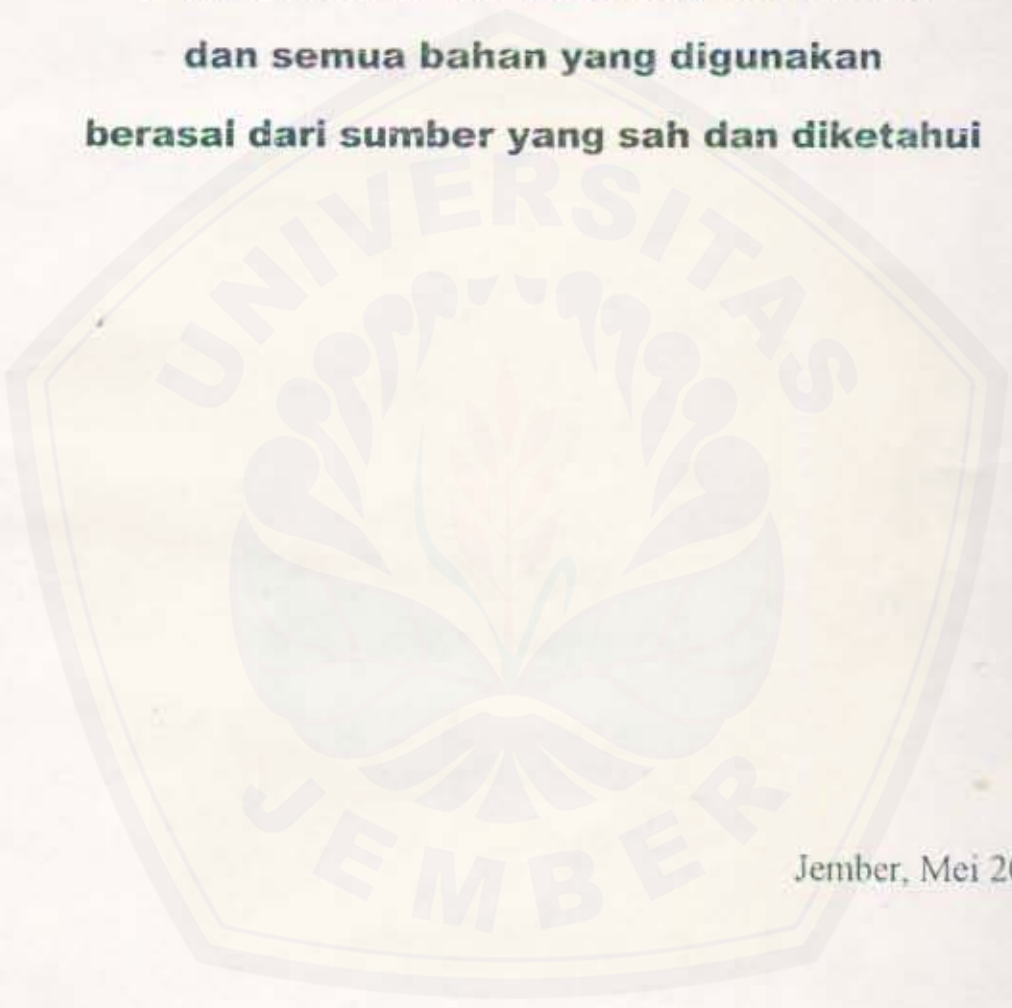
(\*Kahlil Gibran)

*Percayalah pada percaya, bahwa kita punya sayap.  
Terbanglah dengan sayap pengharapanmu itu,  
niscaya semua yang engkau impikan akan terwujud.*

("Prince")

\*)The Wisdom of Kahlil Gibran, Classic Press, Batam, 1987, hal 150

**Saya menyatakan bahwa  
skripsi ini adalah hasil karya asli saya  
dan semua bahan yang digunakan  
berasal dari sumber yang sah dan diketahui**



Jember, Mei 2003

Penulis



LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Tim Penguji Skripsi  
sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Hari : Senin

Tanggal : 19 Mei 2003

Jam : 09.00 WIB

Tim Penguji Skripsi

Ketua



( Drs. Sjoekron Sjah, SU )


Sekretaris



( Drs. Asrial Aziz )

Anggota:

1. Drs. Sjoekron Sjah, SU



( ..... )

2. Drs. Asrial Aziz



( ..... )

3. Drs. Djoko Susilo, M. Si



( ..... )


4. Drs. Pra Adi S



( ..... )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Drs. H. Moch. Toerki

NIP. 130 524 832



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

*Yang laksana air, mengalirkan kedamaian  
pada taman hatiku dan memberikan kesejukan  
dalam kedahagaan jiwaku;*

*Yang laksana udara, memberiku kehidupan  
dalam setiap nafas kasih sayangmu;*

*Yang laksana api, mengobarkan semangatku  
dan menghangatkan harapanku;*

**Papaku Nizar dan Mamaku Aliyah**

**Tak lupa juga adikku Níco dan Kíran  
serta mas raul-ku**

## KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah SWT Yang Maha Esa, Allah sumber segala pengetahuan dan hikmat hidup. Puji syukur kehadiran-Nya, karena atas taufik, hidayah dan ridha-Nya lah, penulis memperoleh kecerahan pikiran, ketentraman hati dan kedamaian jiwa serta kekuatan lahir batin hingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Kerjasama Uni Eropa-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Maastricht".

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Asrial Aziz, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, pikiran dan kasih sayangnya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Djoko Susilo, M. Si, selaku Dosen Pembimbing informal, yang dengan sabar memberi masukan dan perbaikan skripsi penulis hingga selesai.
6. Bapak Moch. Iqbal, S. Sos, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis selama belajar di Universitas Jember.
7. *My beloved*, Papa-Mamaku serta adik-adikku, yang selama ini telah mempercayaiiku melakukan yang terbaik untuk kalian dan menjadi yang terbaik bagi kalian. *I Love You All*.
8. Pak Oetoro, terima kasih atas nasehat-nasehatnya yang membuat hidup ini terasa lebih hidup.



9. Keluarga besar Haffaldie, serta Pippo, terima kasih atas do'a-do'anya.
10. Teman-temanku di HI '99 (esp. Futi-Indah, @deet) serta teman kostku semua di Jawa F4B10, Bara 18 dan Halmahera Seventeen (esp. Inantara, mba Arien, Binti, Chell's), terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini yang telah membuatku betah tinggal di Jember.
11. Yang turut membantu mengumpulkan data, Zizou (*thanx for the book*), mas Andie', mas Ardhie dan mas Nurbi, *thanks a lot*.
12. Teman kerjaku di Wing's (esp. Pak Erwin dan Pak Santo) dan di Alfa (esp. mas Nur Wahid), terima kasih telah menemaniku di masa-masa yang sulit.
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional.

Jember, Mei 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah .....	1
1. 2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	5
1. 2. 1 Batasan Materi .....	6
1. 2. 2 Batasan Waktu .....	6
1. 3 Rumusan Masalah .....	7
1. 4 Kerangka Dasar Pemikiran .....	8
1. 5 Hipotesis .....	14
1. 6 Metode Penelitian .....	15
1. 6. 1 Pengumpulan Data .....	15
1. 6. 2 Analisa Data .....	16
1. 7 Pendekatan .....	16
BAB II GAMBARAN UMUM UNI EROPA .....	19
2. 1 Sejarah Integrasi Uni Eropa .....	19
2. 2 Perjanjian Maastricht .....	23
2. 2. 1 Integrasi Politik .....	24
2. 2. 1. 1 Kedaulatan Nasional vs Integrasi Regional .....	26
2. 2. 1. 2 Uni Eropa sebagai Entitas "Negara" .....	28

2. 2. 2 Integrasi Ekonomi.....	31
2. 3 Uni Eropa Pasca Perjanjian Maastricht.....	33
2. 3. 1 Kekuatan Integrasi .....	35
2. 3. 2 Keanggotaan Uni Eropa.....	38
BAB III KERJASAMA UNI EROPA-AMERIKA SERIKAT.....	41
3. 1 Beberapa Fakta Penting .....	41
3. 2 Pemantapan Kerjasama Pasca Perjanjian Maastricht .....	42
3. 2. 1 Dasar Kerjasama Uni Eropa-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Maastricht .....	43
3. 2. 1. 1 <i>New Transatlantic Agenda</i> .....	43
3. 2. 1. 2 <i>Transatlantic Economy Partnership</i> .....	46
3. 2. 1. 3 <i>Bonn Declaration</i> .....	46
3. 2. 2 Kerjasama Diplomatik.....	47
3. 3 Perspektif Uni Eropa-Amerika Serikat terhadap Hubungan Trans-atlantik.....	48
3. 3. 1 Perspektif Uni Eropa.....	48
3. 3. 1. 1 Amerika Serikat sebagai Stabilisator Keamanan Region .....	48
3. 3. 1. 2 Amerika Serikat sebagai <i>Hegemonic Power</i> ....	50
3. 3. 2 Perspektif Amerika Serikat.....	52
3. 3. 2. 1 Uni Eropa sebagai Sekutu Setia Amerika Serikat	53
3. 3. 2. 2 Uni Eropa sebagai <i>Rival</i> Amerika Serikat .....	54
BAB IV. DINAMIKA KERJASAMA UNI EROPA-AMERIKA SERIKAT PASCA PERJANJIAN MAASTRICHT .....	57
4. 1 Beberapa Perubahan yang cukup Sigrifikan .....	57
4. 1. 1 Permasalahan yang Muncul.....	59
4. 1. 2 Perbedaan Persepsi .....	62
4. 2 Beberapa Contoh Kasus.....	66

# Digital Repository Universitas Jember

## 4.3 Prospek Kerjasama Uni Eropa-Amerika Serikat di Masa

Mendatang .....	70
4.3.1 Kerjasama Uni Eropa-Amerika Serikat akan tetap mengalami Pasang Surut.....	70
4.3.2 Kerjasama Uni Eropa-Amerika Serikat akan tetap diwarnai Ketegangan.....	74

BAB V. KESIMPULAN.....	77
------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





1. Peta Wilayah Uni Eropa
2. *Transatlantic Agenda*
3. *Transatlantic Declaration*
4. Hubungan Kerjasama UE-AS
5. Angka Kerjasama UE-AS
6. Agenda, dialog dan pertemuan antara UE-AS
7. Fakta Kerjasama UE-AS
8. Data Statistik Penunjang



## I. PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang Masalah

*Dunia tanpa batas*, begitulah kira-kira kata yang tepat untuk melukiskan keadaan dunia saat ini. Masyarakat Internasional sekarang ini berada dalam keadaan yang berubah terus menerus seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak arus globalisasi yang melanda dunia. Ketergantungan antar negara pun tak dapat dihindarkan, hal ini tampak dengan semakin *intensnya* hubungan kerjasama antar negara-negara di dunia. Kerjasama antar negara perlu dikembangkan dalam rangka memperjuangkan kepentingan Nasional dalam konteks Internasional, yang semua itu tak lain terfokus pada kebutuhan suatu negara untuk tetap *survive* dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang semakin kompleks.

Pengertian kerjasama menurut James E. Dougherty dan Roberts L. Pfaltzgraff Jr., adalah:

A set of relationships that are not based on coercion or compellence and that are legitimized, as in an International organization such as the United Nations or European Union<sup>1</sup>

Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa kerjasama (dalam hal ini kerjasama antar negara) merupakan suatu hubungan yang sah yang tidak didasari atas suatu paksaan. Secara sederhana, kerjasama bisa diartikan sebagai suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul bila masing-masing pihak menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut<sup>2</sup>.

Salah satu bentuk kerjasama antar negara tampak pada hubungan transatlantik (*Trans-atlantic relation*), yang secara harfiah diartikan sebagai suatu

<sup>1</sup>James E. Dougherty dan Roberts L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, Longmen, New York, 1997, hal 418

<sup>2</sup>Charles H. Cooley dalam Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 80.



kerjasama antara negara-negara yang terpisahkan oleh samudera Atlantik, yaitu negara-negara di benua Eropa di satu sisi dan negara-negara di benua Amerika di sisi lain. Namun, umumnya hubungan trans-atlantik yang dikenal selama ini adalah hubungan kerjasama antara negara-negara Eropa (yang kini terwadahi dalam suatu organisasi regional Eropa, Uni Eropa atau UE) dan Amerika Serikat (AS), baik itu yang bersifat bilateral maupun multilateral. Walaupun hubungan antara UE-AS ini identik dengan hubungan kerjasama militer-pertahanan keamanan, namun sebenarnya hubungan trans-atlantik UE-AS ini meliputi berbagai bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum dan sebagainya.

Fenomena kemitraan UE-AS ini sebenarnya sudah terjalin sejak lama, jauh sebelum negara-negara Eropa terorganisir dalam UE, tepatnya tahun 1886, dimana perdagangan, perpindahan modal, manusia dan ide sudah melintasi samudera Atlantik, dari benua Eropa ke benua Amerika, atau sebaliknya, dari benua Amerika ke benua Eropa. Namun, yang sering dipakai sebagai patokan waktu mulai terjalinnya hubungan trans-atlantik antara UE-AS ini adalah ketika terjadi Perang Dunia I, karena pada saat inilah dijalin hubungan yang lebih formal, *G to G*. Saat itu AS mulai meninggalkan politik isolasionisme<sup>3</sup> dan mulai ikut terlibat dalam hubungan Internasional dengan mengembangkan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di dunia, salah satunya dengan negara-negara Eropa.

Pada awalnya hubungan trans-atlantik ini terjalin dengan baik karena situasi dan kondisi yang mendukung, dimana keadaan Internasional pada waktu itu masih bersifat bipolar, konstelasi politik dunia masih diwarnai ketegangan pertentangan antara 2 blok kekuatan besar, AS dan Uni Soviet (USSR). Adanya kepentingan AS dalam mengamankan prinsip politik demokrasi dan ekonomi pasar bebas (yang sering dinyatakan dalam ungkapan ideologis: "demokrasi-

---

<sup>3</sup> Suatu strategi politik-militer dengan tingkat keterlibatan yang rendah dalam sebagian besar bidang isu sistem, jumlah transaksi diplomatik dan komersial yang rendah dengan unit politik atau masyarakat lain dan upaya untuk menutup rapat negara terhadap berbagai bentuk penetrasi external. Dikutip dari KJ Holsty dan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional (Kerangka untuk Analisis)*; edisi ke-4 jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1988, hal 109.



liberal”) dimanapun, khususnya di Eropa, telah memperkuat hubungan transatlantik. Hal ini ditandai dengan penerapan kebijakan luar negeri AS untuk membangun kembali Eropa melalui Marshall Plan 1947 (bantuan dana AS untuk pemulihan krisis ekonomi Eropa pasca Perang Dunia) dan Doktrin Truman 1947 (politik pembendungan untuk menahan perkembangan komunisme Soviet ke Eropa).

Satu bentuk awal kerjasama UE-AS secara formal tampak dalam pelebagaan kerjasama pertahanan keamanan-militer dalam keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Kerjasama dalam NATO pada mulanya bertujuan untuk membendung pengaruh komunis Soviet atau dengan kata lain untuk mengimbangi kekuatan militer Soviet. Dalam perkembangannya, ternyata lebih luas dari itu. Hal ini dibuktikan ketika Perang Dingin berakhir dengan hancurnya USSR, ternyata tidak dengan serta merta membubarkan NATO. Bahkan bisa dikatakan NATO saat ini lebih berkembang dari sebelumnya. Adanya Konferensi Tingkat Tinggi NATO setiap 2 tahun sekali, pertemuan antara Menlu dan Menhankam anggota NATO dan konsultasi reguler antara delegasi anggota NATO, secara tidak langsung telah memberi dampak positif bagi hubungan transatlantik antara UE-AS yang terjalin dalam keanggotaan NATO. Bahkan NATO tidak hanya *survive*, tetapi juga telah berhasil mengembangkan keanggotaannya meluas ke wilayah Eropa Timur yang dulunya menjadi wilayah kekuasaan komunis Soviet, suatu hal yang mustahil tercapai tanpa adanya komitmen kerjasama yang kuat antara anggota di dalamnya, yang *notabene* adalah negara-negara UE dan AS.

Dalam bidang ekonomi, kerjasama UE-AS ini terjalin dalam suatu kerjasama yang cukup signifikan untuk melakukan liberalisasi ekonomi dunia yang menjadi salah satu tujuan bersama. Kerjasama G8 (organisasi negara-negara industri maju yang didominasi oleh negara-negara UE dan AS), berbagi keanggotaan dalam OECD, WTO, APEC, serta organisasi ekonomi sejenis yang lainnya cukup membuktikan keberadaan kerjasama yang kuat antara UE-AS.



## Digital Repository Universitas Jember

Dalam bidang hukum, UE-AS juga bekerjasama untuk menanggulangi pemalsuan uang, narkoba dan imigran gelap.

Hubungan trans-atlantik antara UE-AS ini dalam kenyataannya tidak selalu berjalan mulus, sering juga terjadi pertentangan atau perbedaan persepsi antar keduanya. Kalaupun itu terjadi, hal itu tidak memberi ruang yang cukup berarti bagi pecahnya hubungan trans-atlantik karena pada dasarnya kerjasama dibangun berdasarkan prinsip kesejajaran akibat persamaan kepentingan, dan yang lebih ekstrim lagi karena adanya musuh bersama; komunisme. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terutama berakhirnya Perang Dingin di satu sisi (yang berdampak dengan munculnya sistem dunia yang unipolar dengan AS sebagai pusatnya) dan di sisi lain UE semakin memantapkan keorganisasiannya melalui Perjanjian Maastricht (1993), hubungan keduanya semakin memburuk. Perbedaan ide maupun kepentingan antara keduanya semakin tajam.

Banyak kasus yang menunjukkan hubungan UE dan AS tidak seharmonis dulu lagi. Dalam bidang politik misalnya, gagalnya AS untuk mendapatkan kursi dalam Komisi HAM PBB terjadi hanya karena 3 negara anggota UE (Austria, Perancis dan Swedia) yang telah mendapatkan kursi dalam komisi itu (mewakili *Western and Other Group*) mengancam akan menanggalkan keanggotaan mereka dalam komisi jika AS diterima. Mereka tidak mau berada dalam keanggotaan organisasi Internasional yang sama dengan AS<sup>4</sup>.

Dalam bidang militer, kebijakan George W. Bush Jr. untuk menjual 8 kapal selam berkekuatan diesel ke Taiwan (walaupun sudah 4 dekade ini kapal selam itu sudah tidak diproduksi lagi), telah menimbulkan pro dan kontra UE sebagai partner penting AS dalam penataan keamanan wilayah Asia. Diantara negara-negara anggota UE, hanya Jerman dan Belanda yang menyetujui kebijakan Bush tersebut<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> David Ignatius, dalam Ivo H. Daalder, *Are the United States and Europe Heading for Divorce?*, *International Affairs*, vol 77, no 3, 2001, hal 566

<sup>5</sup> Joseph Fitchelt dalam Ivo H. Daalder, *ibid*

Dalam bidang ekonomi, ketika AS mengajukan usul pendirian Bank Pembangunan Timur Tengah (dengan komitmen finansial dari negara-negara Arab, negara-negara UE, Jepang dan AS) , dari semua negara anggota UE, hanya Italia yang menerima usulan AS tersebut. Dan ketika UE berinisiatif untuk memimpin pembangunan ekonomi di Afrika Utara, hal ini ternyata tidak mendapat dukungan dari AS yang ditandai dengan ketidakhadiran AS dalam pertemuan di Barcelona untuk membahas masalah pembangunan ekonomi di Afrika Utara tersebut<sup>6</sup>.

Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam perkembangan hubungan kerjasama antara UE-AS ini ketika UE memantapkan keorganisasiannya melalui kerangka dasar Perjanjian Maastricht. Hal inilah sebenarnya yang menarik minat penulis untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih komprehensif dan mendalam dalam suatu penulisan ilmiah dengan judul:

**Kerjasama Uni Eropa-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Maastricht**

**1. 2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan menganalisa permasalahan secara sistematis dan terarah, diperlukan ruang lingkup pembahasan. Seperti yang dikemukakan oleh Joseph Frankel:

Pada suatu titik tertentu, kejadian historis adalah unik karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita, maka akan semakin sukar untuk membuat pernyataan<sup>7</sup>.

Dari pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa ruang lingkup pembahasan juga diperlukan untuk menghindari meluasnya masalah agar fokus kita terhadap masalah lebih tajam. Dari sini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan menjadi 2 segi, yaitu: segi materi dan segi waktu.

<sup>6</sup> Zalmay Khalilzad, *Challenges In The Greater Middle East*, Journal of Palestine Studies XXIX, No. 3, Spring, 2000, hal 208-209

<sup>7</sup> Joseph Frankel, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1990, hal.20



## 1. 2. 1 Batasan Materi

Batasan materi menunjukkan materi apa yang dikaji penulis, yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah kerjasama UE-AS pasca Perjanjian Maastricht, dalam suatu kajian ekonomi politik.

## 1. 2. 2 Batasan Waktu

Batasan waktu berkenaan dengan rentang waktu yang dikaji penulis. Dalam hal ini, penulis mencoba melihat permasalahan kerjasama UE-AS pasca Perjanjian Maastricht dalam rentang waktu akhir abad 20, tepatnya tahun 1993, ketika Perjanjian Maastricht diratifikasi oleh negara-negara UE, sampai ketika penulisan ini dibuat (2003).

Rentang waktu itu dipilih penulis karena dalam rentang waktu inilah terlihat perbedaan yang pasti antara perspektif UE dan AS dalam menyikapi kemitraan yang telah mereka jalin selama ini. Kemantapan integrasi UE melalui Perjanjian Maastricht pada hakekatnya telah membawa sedikit perubahan bagi perkembangan kemitraan antara UE dan AS yang sering disebut sebagai hubungan trans-atlantik ini. UE yang semakin *independent* dengan kemandirian organisasinya dan didukung oleh perluasan keanggotaannya semakin menunjukkan eksistensinya di dunia Internasional tanpa harus dibayang-bayangi oleh kekuatan AS. Padahal di sisi lain, AS semakin menunjukkan kearoganannya sebagai kekuatan hegemon dalam sistem unipolar yang diciptakannya.

Karena alasan itulah penulis memilih rentang waktu 1993-2003 untuk membatasi kajian permasalahan. Namun, tidak menutup kemungkinan penulis memasukkan hal-hal di luar itu sejauh masih relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini dimaksudkan untuk lebih bisa menjelaskan fenomena yang ada secara lebih memadai dan lebih komprehensif tanpa harus terlepas dari esensi permasalahan sesungguhnya yang akan dibahas.

Misalnya, untuk menjelaskan kerjasama UE-AS, akan sangat membantu sekali bila melihat sejarahnya, yakni sebelum Perjanjian Maastricht dibuat, sehingga bisa diketahui perbedaan yang pasti dalam fenomena kerjasama trans-

## Digital Repository Universitas Jember

atlantik itu, sebelum dan sesudah Perjanjian Maastricht. Memang agak keluar dari batasan waktu, tapi itu tak lain hanya membantu menjelaskan fenomena secara lebih memadai, fokus kajian tetap ada pada rentang waktu yang dipilih penulis.

### 1.3 Rumusan Masalah

Masalah tak lain adalah suatu keadaan dimana realita yang ada tidak sesuai dengan harapan kita, dan karenanya menggugah kita untuk memahami dan memecahkan masalah. Menurut Muhammad Hatta:

Masalah ialah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam. Masalah berhubung dengan ilmu. Masalah menimbulkan soal, yang harus diterangkan oleh ilmu. Ilmu senantiasa mengemukakan pertanyaan: bagaimana (duduknya) dan apa sebabnya<sup>8</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat hubungan masalah dengan ilmu. Suatu penelitian ilmiah berangkat dari problematika permasalahan yang muncul dalam benak kita dalam bentuk serangkaian pertanyaan yang memerlukan jawaban. Karenanya problematika perlu ditentukan secara tepat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penelitian ilmiah. Karena pada dasarnya, penentuan problematika atau perumusan masalah menjadi dasar seseorang untuk menentukan objek penelitian. Perumusan masalahpun akan mempermudah penulis dalam mengarahkan pembahasan sehingga tetap fokus pada permasalahan yang diajukan.

Sejak terbentuknya UE pada dekade 1990-an sebagai perkembangan lebih lanjut dari organisasi Masyarakat Eropa (ME), Eropa sekarang telah menjadi suatu kawasan yang lebih damai dan lebih demokratis dari sebelumnya. Perkembangan liberalisasinya pun cukup signifikan. UE memasuki tahap baru integrasi, dari persekutuan negara-negara dengan basis pasar bersama menuju ke entitas politik yang menguasai beberapa atribut kedaulatan negara-negara anggotanya.

Dekade 1990-an benar-benar merupakan dekade UE untuk secara substansial tumbuh dan mengalami transformasi. Perbedaan masyarakat ekonomi

<sup>8</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1974, hal 49.



terwadahi dalam suatu *European Union* dengan pasar bersama, penyatuan ekonomi dan moneter (termasuk mata uang tunggal). Kebijakan luar negeri dan politik keamanan bersama pun telah terwujud, keanggotaanpun terus berkembang. Kesemuanya membuktikan bahwa UE berkemampuan untuk menentukan dan bertindak secara otonom ketika muncul kehendak, terutama yang menyangkut kepentingan UE dalam kancah Internasional. UE muncul sebagai kekuatan dunia, sedangkan di sisi lain, posisi AS di dunia Internasional semakin melemah. Dari sini, timbullah perbedaan ide, persepsi dan kepentingan antara UE-AS dalam lataran kerjasama yang telah mereka jalin selama ini.

Dengan berdasarkan pada fenomena inilah sebenarnya penulisan ini dibuat, yang pada intinya tak lain untuk menjawab pertanyaan:

### **Bagaimana kerjasama UE-AS pasca Perjanjian Maastricht?**

#### **1. 4. Kerangka Dasar Pemikiran**

Memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah membutuhkan teori maupun konsep ilmiah yang relevan terhadap masalah. Teori-teori atau konsep-konsep yang dipakai tak lain merupakan kerangka-dasar pemikiran untuk memahami dan mengerti suatu permasalahan yang muncul dalam benak kita. Bahkan bisa dikatakan bahwa teori maupun konsep merupakan kerangka dasar atau pedoman bertindak dalam menguji data dan menganalisa permasalahan yang ada. Teori maupun konsep sangat diperlukan sebagai landasan analisis dan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi kekaburan dan bisa mengarahkan pada pokok permasalahan yang sebenarnya.

Dalam membahas permasalahan kerjasama UE-AS pasca Perjanjian Maastricht ini penulis memakai teori yang relevan terhadap masalah yang sedikit banyak cukup membantu penulis menjabarkan kajian permasalahan secara lebih komprehensif, yaitu teori integrasi.

## Digital Repository Universitas Jember

Teori integrasi dipakai penulis karena dapat diterapkan dalam 2 level; level Nasional dan level regional<sup>9</sup>. Dalam hal ini, teori integrasi diterapkan dalam level regional dimana teori integrasi dipakai penulis untuk membantu menjelaskan integrasi negara-negara di kawasan Eropa dalam suatu organisasi Uni Eropa (UE), dari awal terbentuknya sampai bisa menjadi seperti saat ini, yang *notabene* turut mempengaruhi hubungan trans-atlantik antara UE dan AS.

Adapun definisi integrasi itu sendiri oleh Mochtar Mas' oed diartikan sebagai; "membentuk bagian-bagian menjadi suatu kesatuan"<sup>10</sup>. Sedangkan menurut Ernest Haas, integrasi adalah:

Proses dengan mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat yang baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya.<sup>11</sup>

Dari dua pengertian ini dapat dipahami bahwa integrasi tak lain adalah suatu proses, untuk mencapai suatu kondisi komunitas politik yang didasari pada persamaan *shared-norms*, nilai-nilai, kepentingan dan tujuan negara-negara yang berintegrasi.

Karena tulisan ini merupakan suatu kajian ekonomi politik, secara spesifik penulis memakai **teori integrasi ekonomi**. Teori integrasi ekonomi dipakai penulis untuk mengetahui sejauh mana efek politik sebagai akibat lebih lanjut dari ketergantungan ekonomi antara negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan UE, yang selanjutnya sedikit banyak mempengaruhi hubungan kerjasama UE dan AS.

Menurut Mochtar Mas' oed, dasar utama integrasi ekonomi tak lain adalah keinginan untuk melakukan liberalisasi hubungan ekonomi antar negara yang

---

<sup>9</sup> I Nyoman Sudira, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, dalam Andre H. Pareira (Ed), *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal 157

<sup>10</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal 153

<sup>11</sup> *ibid*, hal 179



pada akhirnya akan turut mendorong terciptanya perdamaian<sup>12</sup>. Asumsinya, integrasi ekonomi akan menciptakan ketergantungan ekonomi yang kuat antar negara-negara yang terintegrasi. Saling ketergantungan ini akan meningkatkan kapasitas produktif dan efisiensi ekonomi pada negara-negara anggota yang selanjutnya juga akan meningkatkan kemakmuran negara-negara anggota. Terciptanya kemakmuran akan menjadi faktor yang sangat kondusif bagi penciptaan dan pemeliharaan perdamaian.

Lebih lanjut, menurut Bella Ballaza, ada beberapa tahapan untuk mencapai perekonomian yang terintegrasi (integrasi ekonomi), yaitu: tahap *Preferential Trading Agreement*, *Free Trade Area*, *Custom Union*, *Common Market*, *Economic Union* dan *Total Economic Integration*<sup>13</sup>. Kesemuanya itu bisa digolongkan dalam 2 kategori:

1. Tahap-tahap yang mendorong pembebasan arus barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi antar negara anggota. Termasuk didalamnya:

a. Tahap *Preferential Trading Agreement*

Merupakan tahap paling awal dan sederhana dari integrasi ekonomi karena derajat integrasi masih rendah serta ruang lingkup integrasi masih terbatas dalam wilayah kerjasama yang sempit. Pada tahap ini, negara-negara yang terintegrasi mengurangi atau merendahkan tingkat perdagangan diantara mereka, tetapi tidak bagi negara yang bukan anggota. Umumnya, pengurangan hambatan perdagangan dilakukan secara sepihak, tidak dilakukan secara serempak, mengingat masih rendahnya derajat integrasi itu sendiri.

b. Tahap *Free Trade Area*

Pada tahap ini terjadi penghapusan hambatan perdagangan timbal balik antar negara anggota. Hal ini tampak dari adanya pengurangan kebijakan tarif dan kuota antar negara anggota atau dengan kata lain terjadi pembebasan arus barang dan jasa antar negara anggota.

<sup>12</sup> lihat Hand Out diktat kuliah oleh Mochtar Mas' oed, *Kerjasama Ekonomi Regional di Dunia Ketiga*, FISIPOL UGM, Yogyakarta, 1988, hal 2

<sup>13</sup> *ibid*, hal 3-4

c. Tahap *Custom Union*

Pada tahap ini negara-negara anggota bersepakat untuk menciptakan hambatan tarif yang sama terhadap barang dan jasa yang datang dari negara bukan anggota (pemberlakuan *Common External Tariff*).

d. Tahap *Common Market*

Pada tahap ini negara-negara anggota memberlakukan pembebasan lalu lintas faktor produksi. Negara-negara anggota sudah mampu mengatur bersama kebijakan produksi dan distribusi barang dan jasa antar anggota serta mampu secara bersama menghadapi kekuatan ekonomi negara bukan anggota.

2. Tahap-tahap yang juga melibatkan peningkatan kerjasama di bidang fiskal dan moneter. Termasuk didalamnya:

a. Tahap *Economic Union*

Pada tahap ini, terjadi harmonisasi kebijakan ekonomi masing-masing negara anggota.

b. Tahap *Total Economic Integration*

Pada tahap ini, terjadi penyatuan kebijakan-kebijakan ekonomi melalui mekanisme penyatuan lembaga-lembaga politik antar negara anggota.

Dari beberapa tahap tersebut, nampaknya UE sudah mencapai tahap terakhir, yaitu tahap *Total Economic Integration* (Integrasi Ekonomi Total). Hal ini ditandai dengan munculnya uni politik dan uni ekonomi moneter seperti yang tertuang dalam Perjanjian Maastricht. Dimana kesemuanya itu pada akhirnya mengarah pada suatu mekanisme penyatuan kebijakan-kebijakan ekonomi (serta kebijakan-kebijakan yang menyangkut bidang yang lain) melalui penyatuan lembaga-lembaga politik antar negara anggota UE. Seperti misalnya, adanya Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan Bersama, Kebijakan Moneter Bersama yang didukung oleh pembentukan Bank Sentral Eropa, penggunaan satu mata uang tunggal Eropa (Euro) dan sebagainya.



## Digital Repository Universitas Jember

Di lain pihak, walaupun terwujud dalam suatu negara federal, AS ternyata belum mampu mengarah pada integrasi ekonomi total seperti yang telah dicapai oleh UE. Bahkan bila dikaitkan dengan kerjasamanya dengan UE dalam konteks hubungan trans-atlantik, ternyata kerjasama UE-AS (dalam bidang ekonomi khususnya) belum juga mencapai tahap integrasi ekonomi total. Pengurangan hambatan perdagangan timbal balik antar kedua pihak memang sudah diterapkan, tetapi penyatuan kebijakan ekonomi melalui mekanisme penyatuan lembaga-lembaga politik yang menjadi ciri dari integrasi ekonomi total belumlah dicapai oleh kedua pihak. Hal ini menunjukkan adanya kenyataan bahwa derajat integrasi ekonomi antara UE dan AS masih rendah, hal mana selanjutnya menggambarkan bahwa kerjasama UE-AS secara umum bisa dikatakan belum benar-benar solid, tidak sebagus kerjasama antar negara-negara yang tergabung dalam organisasi UE. Karenanya, tak heran bila hubungan antar kedua pihak (apakah itu hubungan kerjasama ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan sebagainya) tidak selalu berjalan mulus, mengingat rendahnya derajat integrasi itu sendiri.

Lebih lanjut, keadaan UE seperti sampai sekarang ini yang mengarah pada integrasi ekonomi total tak lain terjadi karena keberhasilan-keberhasilan yang terus dicapainya sebagai suatu konsekuensi *spill over*. Seperti yang dinyatakan oleh Ernst Haas dalam teori integrasi Neo-Fungsionalisme, bahwa integrasi yang terbentuk antara negara-negara pada dasarnya bersifat *spill over*, suatu keadaan dimana satu keberhasilan dalam suatu bidang akan diikuti oleh bidang lain (merambah ke bidang yang lain)<sup>14</sup>. Teori ini sarat dengan muatan politis, berasumsi bahwa suatu integrasi (apapun sifat awalnya) pada akhirnya tidak menutup kemungkinan mengarah ke integrasi politik, dimana tiap-tiap negara anggota menyerahkan kedaulatannya pada organisasi *suprastate* yang bisa dilakukan melalui cara fungsionalisme, dalam artian berjalan secara bertahap sebagai perkembangan keberhasilan dari satu atau beberapa bidang.

Pada awal pembentukannya di tahun 1948, *Organization for European Economic Cooperation* (OEEC) merupakan suatu jalinan kerjasama negara-

<sup>14</sup> James E. Dougherty dan Roberts L. Pfaltzgraff Jr., op. cit, hal 22

negara Eropa dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan keberhasilan yang telah dicapai, organisasi ini merambah pada konteks kerjasama dalam bidang lain (politik, militer, hukum dan sebagainya) sampai seperti yang kita lihat saat ini, dalam bentuk organisasi UE. Dalam melihat integrasi UE itu sendiri, UE ternyata tidak cukup puas dengan keberhasilan yang mereka capai dalam bidang integrasi ekonomi moneter. UE pun berambisi untuk memantapkan keorganisasiannya dalam bidang politik, UE ingin tampil sebagai organisasi *suprastate* yang mewakili entitas politik negara-negara anggotanya. Integrasi dalam UE sendiri kini mengarah ke integrasi politik dengan dilandasi oleh Perjanjian Maastricht 1993 sebagai pedoman untuk mencapai uni politik dan uni moneter.

Integrasi ekonomi yang ada di UE cenderung mengarah pada regionalisme ekonomi dan blok-blok perdagangan. Regionalisme ekonomi merupakan pengelompokan negara-negara dalam suatu wilayah atau region atas dasar kepentingan ekonomi. Terwujudnya regionalisme ekonomi UE akan sangat kondusif bagi penciptaan perdamaian dan keteraturan di wilayah Eropa, lebih luas lagi, perdamaian dan keteraturan dunia. Bahkan bisa dikatakan regionalisme merupakan nukleus masa depan pemerintahan dunia<sup>15</sup>. Regionalisme pada intinya mengarah pada kesatuan politik, yang tampak dalam penyerahan kedaulatan negara-negara anggota kepada suatu organisasi supra-nasional, yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan di dalam wilayah atau regionnya sendiri, dimana secara tidak langsung memberi dampak positif bagi keteraturan Internasional.

Menurut faham regionalisme, kerjasama regionalisme lebih penting dibanding universalisme, karena:

1. dilihat dari sifatnya, regionalisme cenderung dipilih mengingat mudahnya memulai suatu kerjasama antar negara dalam suatu region atas dasar homogenitas kepentingan, tradisi dan nilai-nilai kelompok kecil negara-negara yang bertetangga.

---

<sup>15</sup> Clarence K. Streit dalam John G. Stoessinger, *The Might of Nations*, Random House Inc, New York, 1961, hal 303



2. Dilihat dari mekanismenya, integrasi politik, ekonomi dan sosial akan lebih mudah diraih antar negara-negara dalam suatu region dengan jumlah negara yang sedikit dalam lingkup yang sempit.
3. Dilihat dari perspektif keamanan, ancaman internal terhadap perdamaian region akan segera diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di wilayah tersebut dibanding dengan upaya penyelesaian suatu konflik yang melibatkan pihak luar dari region yang bersangkutan<sup>16</sup>.

Hal ini bisa dipakai sebagai landasan untuk melihat hubungan kerjasama UE-AS yang bisa dikatakan mulai memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis lagi sejak Perjanjian Maastricht. Negara-negara yang tergabung dalam UE pada umumnya lebih mementingkan hubungannya dengan UE daripada hubungan bilateralnya dengan AS, terutama mengenai masalah-masalah dalam konteks Internasional. Hal ini terdorong oleh 3 alasan tersebut di atas, yang kemudian secara tidak langsung berakibat buruk terhadap hubungan trans-atlantik antara UE-AS.

### 1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan gejala atau peristiwa yang berlaku. Sejak Perjanjian Maastricht yang berlaku mulai November 1993, UE semakin memperkuat keorganisasiannya menjadi suatu organisasi *suprastate*. Hal ini berarti secara tidak langsung UE telah memperkuat *power* yang dimilikinya. Akibat yang lebih lanjut, *bargaining position* UE di mata dunia Internasionalpun menguat, sehingga UE menjadi aktor yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam konteks pergaulan antar bangsa.

UE pun kini lebih bersatu dan jauh lebih *independent* dari sebelumnya, tidak lagi berada dalam bayang-bayang AS, padahal di sisi lain AS semakin menampakkan kearoganannya untuk menjadi kekuatan hegemon dalam sistem

---

<sup>16</sup> Bennet, dalam Drs. T. May Rudi, *Studi Strategis (Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin)*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 83



dunia unipolar yang dia ciptakan. Hal ini tentu saja bisa berpengaruh buruk bagi hubungan keduanya yang sudah terjalin selama ini.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menarik hipotesis atau jawaban sementara bahwa:

**Hubungan kerjasama UE-AS pasca Perjanjian Maastricht menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, yang tadinya terjalin dengan baik sekarang mulai menampakkan adanya keretakan. Perbedaan sikap dan pendapat antara UE-AS mengenai isu-isu Internasional yang terkait dengan kepentingan bersama seringkali mewarnai hubungan kerjasama antar keduanya. Salah satunya mengenai pemberlakuan Euro sebagai mata uang tunggal Eropa yang melahirkan nuansa *struggle for power* antara UE-AS dalam usaha mereka untuk tampil sebagai kekuatan dunia.**

## 1. 6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang dibuat. Data sendiri, yang berisikan tentang fakta yang ada di lapang, sangat penting bagi pengujian kebenaran penelitian. Data ada dua macam, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari penelitian di lapangan yang bisa diperoleh melalui teknik wawancara, pengisian angket dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data tidak langsung yang biasanya didapat dari sumber-sumber tertulis, seperti; buku, jurnal, surat kabar, artikel dan sebagainya.

### 1. 6. 1 Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, dengan mempertimbangkan tersedianya waktu dan biaya yang terbatas, penulis menggunakan data sekunder yang berupa buku-buku ilmiah, jurnal, surat kabar, artikel dan laporan berkala. Data-data sekunder ini didapat penulis dengan mendatangi tempat-tempat yang menyediakan data-data tersebut, seperti :



- CSIS (*Centre Strategies for International Studies*)
- Perpustakaan Universitas Jember
- Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Situs-situs internet

### 1. 6. 2 Analisa Data

Untuk menyederhanakan data yang ada agar mudah ditafsirkan, maka diperlukan analisa data. Data yang ada yang berhasil dikumpulkan penulis berasal dari data sekunder. Dalam menganalisa data sekunder ini, penulis memakai cara berpikir deduktif, suatu cara berpikir dari sesuatu hal yang umum menuju ke hal yang khusus. Metode deduktif ini dipilih penulis karena penelitian yang diadakan berangkat dari teori atau konsep yang sudah ada yang selanjutnya menjadi pegangan untuk membuat hipotesis yang pada akhirnya akan diuji kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Penelitian dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesa yang dibuat bahwa kerjasama UE-AS pasca Perjanjian Maastricht menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, bisa dikatakan tidak seharmonis sebelumnya seperti ketika UE masih dijuluki "sekutu setia AS".

### 1. 7 Pendekatan

Pendekatan merupakan salah satu cara pengumpulan data karena turut menentukan teori atau konsep apa yang dipakai nantinya untuk membantu menjelaskan permasalahan yang diangkat. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:

Keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur bulat mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut<sup>17</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendekatan berguna untuk membantu melihat permasalahan ilmiah yang telah dirumuskan sehingga kajian penelitian akan tetap terfokus pada pembahasan yang dipaparkan.

---

<sup>17</sup>The Liang Gie, op. Cit, hal 81 \

Dalam penulisan ini, penulis memakai pendekatan ekonomi politik. Asumsi dasar dari pendekatan ekonomi politik adalah bahwa kegiatan ekonomi dan politik sebenarnya tidak dapat dipisahkan, antara satu dengan yang lain terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Di satu pihak, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi, di lain pihak, proses ekonomi mempengaruhi proses politik. Dinamika hubungan Internasional sekarang ini pun pada dasarnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara faktor ekonomi dan faktor politik. Karenanya setiap analisa masalah hanya akan berarti bila sekaligus dipertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik didalamnya. Oleh Dorojatun Kuntjoro Jakti, pendekatan atau metode analisa ekonomi politik diartikan sebagai pendekatan permasalahan yang berasal dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik<sup>18</sup>. Pendekatan ini mencoba menerangkan tindakan-tindakan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan politik. Dengan kata lain, di belakang kegiatan politik ada motivasi ekonomi yang mendasarinya.

Perbedaan sikap dan persepsi antara UE-AS dalam membangun kemitraan mereka pada dekade terakhir ini sedikit banyak memiliki tendensi ekonomi politik di dalamnya. UE yang memantapkan keorganisasiannya melalui Perjanjian Maastricht berkehendak untuk tampil sebagai aktor dunia yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja ternyata memiliki motivasi ekonomi atas tindakannya yang sering tidak sependapat dengan AS dalam menjalin kemitraan mereka. Pemberlakuan Euro saja telah membuktikan bahwa ada motivasi ekonomi UE, selain ingin memantapkan kestabilan perekonomian negara-negara anggota serta peningkatan kesejahteraan rakyatnya, UE juga berkeinginan untuk tampil sebagai *leader* perekonomian dunia dengan membayang-bayangi kekuatan perekonomian AS yang kian lama kian menurun. Pemberlakuan Euro dinilai akan mengancam posisi dollar AS yang selama ini menjadi mata uang Internasional. Jika Euro dapat mengambil hati masyarakat ekonomi dunia dan diakui sebagai mata uang dunia, tentunya perekonomian dunia akan diambil alih

---

<sup>18</sup> Dorojatun Kuntjoro Jakti, *Pendekatan Politik Ekonomi (Political Economy): Jembatan Di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik*, dalam Jurnal Ilmu Politik 8, API-LIPI-PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 5-6



kepemimpinannya oleh UE. Selanjutnya, sebagai konsekuensinya, tidak menutup kemungkinan UE akan tampil sebagai kekuatan politik dunia yang melebihi AS. Hal mana selanjutnya melahirkan nuansa *struggle for power* antara UE-AS untuk tampil sebagai *leader* perekonomian dunia. Hal ini tampak dari adanya perbedaan sikap dan pendapat antara UE-AS dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan kebijakan bersama, dimana tidak hanya berkutat pada persoalan ekonomi, tetapi juga merambah pada bidang yang lain (politik, militer, pertahanan keamanan, sosial budaya dan sebagainya).

Penulis juga memakai pendekatan sejarah politik. Menurut Charles Eisenmen, pendekatan sejarah politik berusaha menggambarkan fakta politik secara kronologis melalui pengumpulan dan penafsiran sejarah atau peristiwa masa lalu untuk mencari dan memahami fakta sejarah lebih komprehensif lagi<sup>19</sup>. Pengertian tersebut dapat dipahami dengan mudah karena logikanya, kejadian saat ini disebabkan oleh kejadian sebelumnya. Penelaahan peristiwa-peristiwa politik akan lebih berhasil bila dikaitkan dengan sejarah, karena dalam setiap kehidupan manusia tentunya selalu diwarnai perjuangan kekuasaan. Pendekatan ini dipakai penulis untuk mengetahui sejarah perkembangan integrasi UE sejak Perjanjian Maastricht 1993, yang sedikit banyak mempengaruhi esensi hubungan transatlantik antara UE-AS. Selain itu, pendekatan ini dipakai penulis untuk mengetahui perkembangan hubungan transatlantik itu sendiri, terutama *pasca* Perjanjian Maastricht.

---

<sup>19</sup> The Liang Gie, *op. Cit.*, hal 87

## II. GAMBARAN UMUM UNI EROPA

## 2.1 Sejarah Integrasi Uni Eropa

Terbentuknya Uni Eropa (UE) berawal dari ide tentang pembentukan *United States of Europe* yang pernah disampaikan oleh Victor Hugo pada tahun 1849. Pada tahun 1946, Winston Churchill juga mengemukakan ide serupa untuk membentuk kesatuan Eropa dalam pidatonya di Zurich University<sup>20</sup>. Pemikiran Churchill ini ditanggapi positif oleh negara-negara di kawasan Eropa, terutama dikarenakan adanya optimisme yang begitu tinggi bahwa berakhirnya Perang Dunia II memberi kesempatan bagi negara-negara Eropa untuk bekerjasama dalam suatu organisasi Internasional, sehingga tembok pembatas ketidakpercayaan yang selama ini mewarnai persetujuan antar mereka akan lenyap, dan pastinya jalan menuju perdamaian semakin terbuka.

Sebagai reaksi dari pemikiran Churchill ini, 16 negara Eropa Barat mengadakan pertemuan di Haque pada bulan Mei 1948 yang menghasilkan suatu keputusan bersama yang menghendaki terbentuknya suatu uni ekonomi dan uni politik Eropa dalam suatu *Organization for European Economic Cooperation* (OEEC). Hal ini berlanjut dengan dibentuknya *Council of Europe* (Dewan Eropa) pada bulan Mei 1949 yang memainkan peranannya sebagai kerangka dasar struktur integrasi regional Eropa, terutama di bidang politik dan keamanan. Namun ternyata organisasi ini lemah karena tujuan organisasinya tidak jelas. Kegagalan ini mendorong negara-negara Eropa untuk menciptakan integrasi yang lebih kuat dan saling menguntungkan.

Integrasi UE secara riil dimulai dengan kerjasama ekonomi dalam suatu organisasi *European Coal and Steel Community* (ECSC), yang disahkan melalui Perjanjian Paris pada tahun 1951, sebagai perwujudan ide M. Schuman untuk membentuk organisasi supra-nasional di kawasan Eropa. Organisasi ini tak lain bertujuan untuk mengatur masalah produksi batubara dan besi baja yang selama ini telah menjadi bibit pertikaian antara Jerman dan Perancis, bahkan sampai mengarah pada perang terbuka dalam dua kali Perang Dunia. Organisasi

<sup>20</sup> Edison Muchlis M, *Evolusi Integrasi Menuju Uni Eropa*, dalam Ikrar Nusa Bhakti dkk, *Studia Politika 2*, Yayasan Insan Politik-LIPI, Jakarta, 2000, hal 117



yang dibentuk oleh 6 negara (Belanda, Belgia, Italia, Jerman Barat, Luxemburg dan Perancis) ini memakai prinsip *common high authority* (kewenangan tinggi bersama) dalam keorganisasiannya. Artinya, bahwa negara-negara anggota harus tunduk pada otoritas pusat organisasi yang mewakili kewenangan negara-negara anggota.

Sebagai suatu konsekuensi *spill over*, keberhasilan ECSC untuk mengorganisir kepentingan-kepentingan negara-negara anggotanya ini mendorong dibentuknya organisasi serupa di bidang lain, seperti *European Defence Community* (EDC) dan *European Political Cooperation* (EPC). Namun dalam perjalanannya, kedua organisasi ini gagal karena perekonomian Eropa masih lemah. Diyakini bahwa untuk membentuk suatu organisasi politik dan pertahanan keamanan antar bangsa harus ditunjang dengan kondisi perekonomian yang kuat antara negara-negara anggota.

Karena itu dibentuklah suatu organisasi yang berbasis ekonomi, *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Energy Community* (Euratom) pada tahun 1957 melalui Perjanjian Roma. Terbentuknya EEC atau yang kita kenal sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sebenarnya merupakan reaksi dari usaha hegemoni politik, militer dan ekonomi Amerika Serikat terhadap proses integrasi Eropa yang sebelumnya terwujud dalam organisasi OECD. EEC inipun muncul sebagai organisasi Internasional yang mempunyai karakteristik yang unik. Mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi ditentukan oleh tarik menarik kepentingan antara para komisioner dan para menteri yang mewakili negara-negara anggota yang sama-sama tergabung dalam Dewan Menteri. Dengan kontrol yang kuat dari para komisioner, maka keputusan yang sifatnya destruktif terhadap integrasi Eropa dapat dihindari.

Adapun tujuan dari pembentukan EEC ini adalah untuk mencapai Uni Ekonomi Eropa yang terwujud dalam *Economic and Monetary Union* (EMU) yang akan dicapai selangkah demi selangkah (bersifat gradual atau bertahap). EEC memulainya dengan memberlakukan *Free Trade* atau pasar bebas, dimana semua bentuk halangan perdagangan yang berupa kuota dihapus bagi negara-negara anggota. Tahap selanjutnya, mendirikan *Customs Union*, menghapus



semua bentuk halangan perdagangan yang berupa tarif antar negara anggota. Tahap ketiga, pembentukan *Internal Commodity Market* dengan memberlakukan *common tariff* terhadap barang dan jasa yang datang dari negara bukan anggota. Keberhasilan ini akan diikuti dengan kebebasan arus barang dan jasa di seluruh negara anggota dalam suatu *Common Market* yang selanjutnya memberi kontribusi positif bagi terbentuknya suatu uni ekonomi dan moneter Eropa.

Dalam perkembangannya kemudian, EEC ini berkembang menjadi *European Community (EC)* melalui Akta Tunggal Eropa tahun 1987, yang cakupan bidangnya lebih luas lagi, tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga masalah lain, seperti politik, budaya, moneter dan sebagainya<sup>21</sup>. Pembentukan EC ini merupakan reaksi dari kegagalan *European Union Treaty (EUT)*, suatu ide Persatuan Eropa yang pernah diusulkan oleh Parlemen Eropa pada tahun 1979. Kegagalan EUT ini membawa implikasi yang serius bagi konsolidasi undang-undang. Karenanya terciptalah suatu komitmen untuk membawa integrasi lebih maju dengan melakukan revisi undang-undang Perjanjian Roma, misalnya mengenai proses pengambilan suara yang sedapat mungkin berbasis pada suara rakyat, hubungan legislatif antara Dewan Menteri dengan Parlemen Eropa dan sebagainya. Keinginan EEC untuk maju lebih jauh lagi ini sebenarnya didorong oleh beberapa faktor, antara lain terjadinya *democracy deficit* yang terwujud dalam proses pengambilan keputusan dalam EEC, perdebatan tentang EMU yang memicu pemikiran tentang revisi konstitusi, adanya krisis internal (perselisihan antar negara anggota yang menghambat proses integrasi) serta faktor external (perubahan situasi politik di Eropa Timur, proses reunifikasi Jerman dan atmosfer Internasional pada umumnya dalam situasi Perang Dingin). Situasi seperti ini mendorong EEC memberlakukan Akta Tunggal Eropa yang sekaligus menjadi landasan perubahan nama EEC menjadi EC (*European Community*) atau yang kita kenal sebagai Masyarakat Eropa (ME).

---

<sup>21</sup> *Key Dates in European History*, [www.europa.eu.int/abc/history/indexen.htm](http://www.europa.eu.int/abc/history/indexen.htm)



Melalui Perjanjian Maastricht 1993, nama EC diganti menjadi *European Union* (EU) atau yang kita kenal sebagai Uni Eropa (UE).

Menurut Edison Muchlis M, sejarah integrasi Eropa paling tidak didasarkan pada lima hal :

1. Adanya kemauan bersama untuk membentuk suatu *a new understanding of Europe*, dalam rangka membangun identitas bersama sebagai alternatif terbentuknya identitas kebangsaan bersama negara-negara Eropa yang tergabung dalam keanggotaan UE.
2. Adanya keinginan untuk hidup berdampingan secara damai antara negara-negara Eropa dan kemauan bersama untuk melindungi diri dari ancaman ekspansi komunis yang waktu itu menghantui stabilitas politik Eropa.
3. Adanya motivasi pendiri UE untuk mencapai kemakmuran yang dipercaya bisa dicapai melalui kerjasama ekonomi regional Eropa yang lebih *intens* dalam suatu organisasi ekonomi regional Eropa.
4. Adanya motivasi pendiri UE untuk mengembangkan konsep *freedom* dan *mobility* sebagai suatu langkah menuju Eropa yang demokratis seperti yang pernah dicita-citakan oleh leluhur mereka.
5. Adanya harapan pendiri UE akan munculnya suatu kekuatan baru dalam hubungan Internasional yang terwujud dalam suatu kebersamaan Eropa<sup>22</sup>.

Dari sini, dapat diketahui bahwa UE muncul sebagai suatu organisasi regional setelah Perang Dunia II tak lain karena beberapa alasan :

1. Kedekatan geografis antar negara-negara anggota UE
2. Adanya keinginan untuk menciptakan perdamaian di kawasan Eropa

Hal ini mengingat sejarah masa lalu Eropa yang begitu kelam, Eropa terkenal sebagai kawasan yang tidak pernah damai, selalu terjadi perang (mulai dari Revolusi Perancis sampai Perang Dunia II), karenanya tak heran bila kawasan Eropa dikenal sebagai "kawasan terpanas" di dunia, tapi tentunya tidak untuk saat ini.

<sup>22</sup> Edison Muchlis M, dalam Ikrar Nusa Bhakti dkk,op. Cit, hal 81

3. Adanya kekuatan besar yang selalu bersaing memperoleh sumber-sumber batubara dan besi baja, yaitu Jerman dan Perancis.

Hal inilah yang menjadi pendorong utama perlunya membentuk suatu organisasi ekonomi pertama di Eropa untuk mengakomodasi kepentingan dua negara tersebut dalam suatu organisasi ECSC pada tahun 1951 yang dalam perkembangannya mengarah pada UE seperti yang ada saat ini.

## 2. 2 Perjanjian Maastricht

Perjanjian Maastricht merupakan ide dari Victor Hugo, disebut juga *Treaty on European Union* (Perjanjian Penyatuan Eropa), ditandatangani di Maastricht, Belanda, pada tanggal 27 Februari 1992 oleh 12 negara EC, dan mulai berlaku sejak 1 November 1993. Perjanjian Maastricht ini meletakkan dasar-dasar yuridis dan politik yang kuat bagi integrasi Eropa dalam UE, sebagai perluasan ruang lingkup wilayah kegiatan yang dulu disebut Masyarakat Eropa (ME) dengan penambahan kerjasama uni politik, uni ekonomi dan uni moneter. Bisa dikatakan bahwa Perjanjian Maastricht ini merupakan perjanjian terlengkap yang memiliki ruang lingkup sangat luas. Dengan Perjanjian Maastricht, nama ME pun dirubah menjadi UE.

Perjanjian Maastricht merupakan kerangka dasar rekayasa politik menuju UE dan merupakan refleksi dari keinginan yang ambisius untuk membangun suatu tatanan bersama menuju suatu *United Europe* (Eropa yang terintegrasi) melalui evolusi yang panjang. Ini membuktikan bahwa kemauan bersama antara negara-negara Eropa untuk menyatukan berbagai dimensi kehidupan nasional dan regional dalam UE merupakan suatu semangat integrasi yang begitu kuat yang pernah ada di dalam konteks hubungan Internasional antar negara-negara dalam suatu kawasan, bahkan bisa dikatakan bahwa hal ini lebih bagus dibanding kerjasama regional lainnya di dunia.

Perjanjian Maastricht terdiri dari 7 titel dilengkapi dengan 14 protokoi dan 33 deklarasi yang pada dasarnya menjadi 3 pilar integrasi UE; penyatuan ekonomi, penyatuan politik serta kerjasama politik luar negeri dan keamanan bersama. Adapun isi Perjanjian Maastricht secara garis besarnya adalah sebagai berikut:



Titel I : Ketentuan Umum

Titel II : Amandemen Perjanjian ME

Titel III : Amandemen Perjanjian ECSC

Titel IV : Amandemen Perjanjian EURATOM

Titel V : Kebijakan luar negeri dan keamanan bersama

Titel VI : Ketentuan kerjasama dalam masalah keadilan dan urusan dalam negeri

Titel VII : Ketentuan Penutup<sup>23</sup>

Perjanjian Maastricht sendiri menggambarkan adanya keinginan yang kuat dari negara-negara anggota UE untuk menciptakan masyarakat Eropa yang sejahtera melalui kesatuan moneter pada tahun 1999 dengan diberikannya Euro sebagai mata uang tunggal UE, kebijakan politik bersama, kebijakan keamanan dan luar negeri bersama serta kebijakan keamanan internal. Lebih lanjut, Perjanjian Maastricht diperkuat lagi dengan Perjanjian Amsterdam yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 1997<sup>24</sup>. Perjanjian Amsterdam ini pada dasarnya memperkuat integrasi politik UE karena didalamnya terkait dengan masalah kebijakan luar negeri bersama, kerjasama dalam aspek hukum, pengakuan HAM dan kesehatan masyarakat.

### **2. 2. 1 Integrasi Politik**

Berakhirnya Perang Dingin menimbulkan implementasi politik dalam situasi politik Eropa yang dapat dilihat dari karakteristik politik yang ada. Hancurnya struktur bipolar dunia telah menenggelamkan keseimbangan politik di kawasan Eropa yang tengah memasuki masa transisi dari tatanan lama menuju ke tatanan baru yang lebih demokratis. Namun meskipun terjadi krisis ekonomi, politik dan sosial, kawasan Eropa masih mampu menjaga stabilitas politiknya dalam negeri masing-masing karena bangunan politiknya ternyata mampu menyelesaikan masalah yang timbul.

Setelah Perang Dingin berakhir, karakteristik situasi politik di Eropa bisa digambarkan sebagai berikut :

<sup>23</sup> dikutip oleh Adison Muchlis M, dalam Ikrar Nusa Bhakti dkk, ibid, hal 85

<sup>24</sup> *A Brief History of European Integration*, [www. Eu\\_hist. htm](http://www.Eu_hist.htm)

1. Kelompok kiri berhaluan komunis kehilangan pijakan, terutama setelah hancurnya Uni Soviet, pamor dan pengaruhnya pun menurun.
2. Kelompok konservatif juga kehilangan pamor karena tidak mampu mengatasi gejolak politik yang melanda di hampir seluruh negara Eropa.
3. Partai-partai kecil bermunculan dengan mengangkat isu-isu baru, seperti *Green Peace* yang lebih terfokus pada persoalan lingkungan hidup.
4. Kekuatan rasis dan regionalisme tumbuh, yang mewarnai perjalanan integrasi UE.
5. Nuansa reformasi kental mewarnai perpolitikan Eropa, dimana setiap negara gencar melakukan reformasi di bidang politik, ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial<sup>25</sup>.

Dalam situasi seperti itu, ME tetap berproses dalam mencapai ambisinya untuk menciptakan integrasi ekonomi dan politik dalam suatu organisasi UE. Integrasi politik UE diawali dengan kerjasama politik antar negara-negara anggota yang perkembangannya dapat ditelusuri dalam berbagai laporan yang antara lain; Laporan Luxemburg 1970, Laporan Copenhagen 1973, Laporan London 1981, Laporan Tuttgarts 1983, Akta Tunggal Eropa 1987 dan Perjanjian Maastricht 1993. Perkembangan integrasi politik UE sendiri bisa dilihat dari 2 fase :

1. *European Political Cooperation (EPC)* pada dasawarsa 1970-an, dimana masalah politik masih di luar kerangka kerjasama yang ada.
2. Akta Tunggal Eropa 1987 yang mendasari dimasukkannya masalah politik dalam kerangka kerjasama intern negara-negara anggota, yang kemudian diperkuat lagi dengan Perjanjian Maastricht 1993<sup>26</sup>.

Dalam Perjanjian Maastricht 1993, masalah politik disebutkan dalam 2 titel, titel V dan titel VI, yaitu mengenai *Common Foreign Policy and Security Policy* serta *Cooperation in the Fields of Justice and Home Affairs*. Yang menarik dalam Perjanjian Maastricht, selain persoalan luar negeri, perjanjian ini juga menyinggung mengenai masalah dalam negeri negara-negara anggota, padahal

<sup>25</sup> Lu Yaokun, Huang Yongjiu, Wang Yange, *West European Political Situation Today: Its Characteristic and Repercussions*, Contemporary International Relations, Vol 3, no. 12, Desember, 1993, hal 1-8

<sup>26</sup> Adison Muchlis M. dalam Ikrar Nusa Bhakti, op. Cit, hal 128



dalam Akta Tunggal Eropa hanya menyangkut masalah politik luar negeri, suatu kemajuan yang cukup berarti.

Pada intinya, Perjanjian Maastricht merupakan penjabaran lebih lanjut dari Akta Tunggal Eropa pasal 30 mengenai *Treaty Provisions on European Cooperation in the Sphere of Foreign Policy*, berisi ;

1. Koordinasi yang menyangkut kepentingan-kepentingan bersama diusahakan melalui mekanisme konsultasi
2. Pengambilan keputusan politik luar negeri didasarkan atas konsensus untuk mencapai posisi bersama (*common European positions*)
3. Koordinator regional dalam kerjasama politik UE dipegang oleh Presiden Dewan Eropa yang dipilih setiap 6 bulan sekali secara bergantian antara negara-negara UE
4. Pendekatan diplomatik (bukan militer) untuk menyelesaikan sengketa Internasional yang didasarkan atas *common position* (posisi bersama)
5. *Security aspects* dan *European identity* dalam hubungan eksternal harus diutamakan
6. Prinsip *consistency* harus diupayakan untuk mencapai kesatuan pandangan dalam mengantisipasi setiap perkembangan Internasional<sup>27</sup>

Dari sini tampak bahwa Perjanjian Maastricht muatan politisnya sangat kental, menggambarkan tujuan UE yang ambisius; menciptakan integrasi politik antara negara-negara anggota UE. Selain hal tersebut di atas, Perjanjian Maastricht juga menyinggung persoalan dalam negeri, seperti masalah imigrasi, bebas lalu lintas untuk kunjungan keluarga, mencari pekerjaan, tinggal permanen atau sementara di negara anggota UE yang lain, masalah narkoba, teroris dan sebagainya.

#### 2. 2. 1. 1 Kedaulatan Nasional vs Integrasi Regional

Dalam kenyataannya, integrasi politik UE membawa implikasi serius bagi persoalan kedaulatan Nasional. UE sebagai suatu organisasi supra-nasional dengan segala atribut kekuasaan dan kewenangan dari negara - negara anggotanya

---

<sup>27</sup> Adison Muchlis M. dalam Ikrar Nusa Bhakti dkk, ibid, hal 92



Strategi kedua, strategi identifikasi, yang berarti bahwa pemerintah nasional dapat menyatakan persetujuannya terhadap keputusan bersama tanpa harus sepenuhnya terikat. Kedua hal ini tentunya diharapkan akan mendorong pada langkah terbentuknya federasi yang pernah dicita-citakan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa proses integrasi UE dimulai dengan pembatasan kedaulatan nasional. Semakin tinggi integrasi, semakin rendah derajat kedaulatan nasional suatu negara. Namun, di balik itu semua, sebenarnya negara-negara anggota UE masih memiliki kedaulatan dalam arti sebenarnya, terutama bila dikaitkan dengan otoritasnya terhadap batas wilayah teritori negaranya<sup>29</sup>. Jadi, meskipun dalam skala kecil, kedaulatan negara-negara anggota UE tetap ada, walaupun dalam teorinya kedaulatan itu diserahkan pada organisasi supra-nasional, UE.

#### 2. 2. 1. 2 UE sebagai Entitas "Negara"

UE merupakan organisasi yang unik. UE bukanlah suatu negara baru yang menggantikan eksistensi suatu negara, bukan pula negara federasi yang tersentralisasi layaknya AS, walaupun begitu UE lebih dari sekedar organisasi Internasional biasa yang umum kita jumpai di dunia. Masing-masing negara secara bertahap memindahkan kekuasaan tertentu ke level pusat tertinggi dalam UE yang notabene merepresentasikan kepentingan negara-negara anggota secara keseluruhan, sehingga keutamaan Eropa sebagai negara yang demokrasi bisa dilihat dalam level UE. Secara bertahap pula UE menjadi suatu organisasi supra-nasional yang hampir mirip eksistensinya dengan suatu negara, walaupun, sekali lagi, bukan "negara" dalam arti yang sesungguhnya.

Satu hal yang perlu dicermati, memang sangat sulit untuk memahami UE dan negara-negara anggotanya. Jika kita belajar UE, maka itu berarti kita harus mempelajari karakteristik negara-negara anggotanya, Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, jika kita mempelajari salah satu negara anggota UE, maka hal itu tak lepas dari konteks UE. Apalagi adanya kenyataan bahwa integrasi politik dalam UE masih sangat lemah, setidaknya bila

---

<sup>29</sup> Charless Hauss, *Comparative Politics: Domestic Responses to Global Challenges*, St. Paul, West, 1997, hal 82



dibandingkan dengan integrasi ekonominya. Namun, dalam tulisan ini penulis mencoba memfokuskan arah kajian bahwa tidak perlu kiranya mempermasalahkan perbedaan UE dan negara-negara anggotanya, mempelajari UE berarti mempelajari negara-negara anggota secara keseluruhan, tidak satu per satu. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dalam UE telah terbentuk suatu sistem pemerintahan terpusat yang membawahi negara-negara anggotanya. Adanya Parlemen Eropa misalnya, sebagai representasi suara rakyat UE karena mekanisme pemilihannya langsung dipilih oleh rakyat, dapat diketahui bahwa UE tidak lagi bertindak satu persatu melainkan bersatu bekerja bersama dalam keragaman yang ada. Selain itu, semua pengambilan keputusan UE diproses dalam level UE yang tentunya merupakan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota.

Dalam sistem pemerintahannya, UE mencerminkan suatu negara demokratis karena memiliki 3 pilar kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tampak dalam 4 organ kekuasaan UE: Komisi UE, Parlemen Eropa, Dewan Menteri dan Mahkamah Agung<sup>30</sup>.

#### 1. Komisi UE

Beranggotakan 20 orang, dimana Inggris, Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol memiliki 2 wakil dalam komisi UE, sedangkan kesepuluh anggota yang lain hanya memiliki 1 wakil dalam komisi. Semua anggota komisi dipilih oleh pemerintah negara anggota untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Komisi UE dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih oleh pemerintah negara-negara anggota UE dan disahkan oleh Parlemen Eropa dengan masa jabatan 5 tahun.

Komisi UE menjalankan fungsi ganda, sebagai lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebagai lembaga legislatif, Komisi UE bisa mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan setiap masalah yang berkembang di UE dan mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang dibuat UE. Dalam hal ini, Komisi UE dituntut *independent*, tidak terikat oleh kewarganegaraannya, sesuai dengan

---

<sup>30</sup> *The European Union and Indonesia, Building Closer Relations*, European Union Delegation of the European Commission, Jakarta, 2000



dibandingkan dengan integrasi ekonominya. Namun, dalam tulisan ini penulis mencoba memfokuskan arah kajian bahwa tidak perlu kiranya mempermasalahkan perbedaan UE dan negara-negara anggotanya, mempelajari UE berarti mempelajari negara-negara anggota secara keseluruhan, tidak satu per satu. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dalam UE telah terbentuk suatu sistem pemerintahan terpusat yang memtawahi negara-negara anggotanya. Adanya Parlemen Eropa misalnya, sebagai representasi suara rakyat UE karena mekanisme pemilihannya langsung dipilih oleh rakyat, dapat diketahui bahwa UE tidak lagi bertindak satu persatu melainkan bersatu bekerja bersama dalam keragaman yang ada. Selain itu, semua pengambilan keputusan UE diproses dalam level UE yang tentunya merupakan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota.

Dalam sistem pemerintahannya, UE mencerminkan suatu negara demokratis karena memiliki 3 pilar kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tampak dalam 4 organ kekuasaan UE: Komisi UE, Parlemen Eropa, Dewan Menteri dan Mahkamah Agung<sup>30</sup>.

#### 1. Komisi UE

Beranggotakan 20 orang, dimana Inggris, Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol memiliki 2 wakil dalam komisi UE, sedangkan kesepuluh anggota yang lain hanya memiliki 1 wakil dalam komisi. Semua anggota komisi dipilih oleh pemerintah negara anggota untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Komisi UE dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih oleh pemerintah negara-negara anggota UE dan disahkan oleh Parlemen Eropa dengan masa jabatan 5 tahun.

Komisi UE menjalankan fungsi ganda, sebagai lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebagai lembaga legislatif, Komisi UE bisa mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan setiap masalah yang berkembang di UE dan mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang dibuat UE. Dalam hal ini, Komisi UE dituntut *independent*, tidak terikat oleh kewarganegaraannya, sesuai dengan

---

<sup>30</sup> *The European Union and Indonesia, Building Closer Relations*, European Union Delegation of the European Commission, Jakarta, 2000



artikel 157 Perjanjian Roma, yang menyatakan bahwa tidak ada pemerintah atau badan apapun yang dapat turut campur tangan terhadap keputusan komisi UE<sup>31</sup>. Sebagai lembaga eksekutif, Komisi UE harus melaksanakan keputusan yang dibuat dalam level UE. Setiap anggota komisi bertanggungjawab atas sebuah jabatan yang terkadang hanya berkutat pada masalah kebijakan dan terkadang perpaduan antara bidang kebijakan dan administrasi.

Tugas komisi menetapkan proposal yang akan disetujui oleh Dewan Menteri (yang merepresentasikan pemerintah negara anggota). Proposal yang disetujui akan menjadi hukum, tetapi jika tidak, maka komisi akan bertindak sebagai mediator untuk mencari dukungan negara-negara anggota terhadap proposal tersebut melalui serangkaian negosiasi.

## 2. Parlemen Eropa

Beranggotakan 626 orang yang tergabung dalam 8 kelompok politik yang merefleksikan ideologi politik partai Nasional negara-negara anggota UE, dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Seperti layaknya Parlemen Nasional, Parlemen Eropa juga mempunyai komite-komite untuk membahas beberapa isu tertentu yang penting, karenanya ia bertindak sebagai lembaga legislatif. Parlemen sebenarnya lebih bersifat konsultatif daripada legislatif. Seperti yang digariskan dalam EEC (*Treaty Indicates*) bahwa Dewan harus berkonsultasi pada Parlemen sebelum memutuskan proposal Komisi<sup>32</sup>. Untuk menjalankan fungsinya, Parlemen memiliki beberapa komite khusus yang menyerahkan laporan hasil kerjanya ke Parlemen untuk diperdebatkan dan keputusan diambil melalui mekanisme voting dalam sidang paripurna.

## 3. Dewan Menteri

Beranggotakan 15 orang yang merepresantasikan pemerintah 15 negara anggota UE yang dipilih dalam level Nasional. Anggotanya merupakan menteri-menteri yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam Dewan. Misalnya, bila masalah pertanian yang dibahas, maka menteri-menteri pertanian dari 15 negara anggota yang bertindak sebagai Dewan Menteri. Ketua Dewan

<sup>31</sup> Dennis Swan, *The Economics of Common Market*, Penguin Books, England, 1992, hal 52

<sup>32</sup> Dennis Swan, *ibid*, hal 61



Menteri selalu berrotasi, bergantian dalam jangka waktu 6 bulan, menurut urutan *alphabet*. Merupakan badan utama legislatif karena menjadi forum pembuatan keputusan (mengesahkan *draft* proposal yang diajukan oleh Komisi UE) yang terkait dengan kompromi atas kepentingan negara-negara anggota. Dewan Menteri bersama Parlemen Eropa membuat peraturan yang menyangkut aktivitas UE; kebijakan luar negeri dan pertahanan keamanan bersama, hukum, politik dalam negeri dan sebagainya.

#### 4. Mahkamah Agung

Beranggotakan 15 hakim *independent* yang mewakili negara anggota. Seperti halnya anggota komisi, hakim-hakim tersebut bukan merupakan representasi nasional melainkan dibutuhkan secara *independent* sebagai pejabat hukum (pengadilan). Sebagai lembaga yudikatif, MA bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan UE dan berlakunya hukum-hukum yang telah dibuat dalam level UE.

Selain 4 badan tersebut, UE juga memiliki 5 badan institusi penunjang, yaitu: *European Economic and Social Committes*, *European Court of Auditors*, *The European Central Bank*, *European Investment Bank* dan *The Committee of the Regions*. Dari keterangan tersebut tampak bahwa sistem pemerintahan yang demikian demokratis dalam UE bisa menjadi indikator seberapa jauh integrasi politik yang sudah dijalani UE.

#### 2. 2. 2 Integrasi Ekonomi

Kecenderungan ekonomi global yang terjadi saat ini mengarah pada usaha untuk membentuk blok ekonomi regional untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang berdampak pada makin kuatnya struktur dasar dan mekanisme kerjasama dalam integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi UE bisa diartikan sebagai penggabungan sistem ekonomi negara-negara anggota ke dalam suatu skala kekuatan ekonomi regional UE. Dalam hal ini UE bertujuan untuk mengurangi disparitas ekonomi antara negara-negara anggota dan juga untuk membantu negara yang lemah perekonomiannya sehingga terwujud kesejahteraan bersama dalam suatu kawasan, yang otomatis akan kondusif bagi terciptanya perdamaian, berawal dari kawasan dan merambah dunia.



Integrasi ekonomi UE dimulai tahun 1970-an yang perkembangannya dapat ditelusuri melalui pelaksanaan Akta Tunggal Eropa sejak tanggal 1 November 1993 dalam Perjanjian Maastricht mengenai penyatuan sistem moneter dan perbankan. Selain itu, integrasi UE dapat pula diamati melalui pelaksanaan *European Monetary System* (EMS) yang mengatur *Exchange Rates Mechanism* (ERM), satu mata uang tunggal Eropa (Euro) dan *European Central Bank* (ECB).

Tanggal 1 Januari 1999, Eropa memasuki integrasi ekonomi regional pada tingkat yang paling tinggi, integrasi ekonomi dan moneter Eropa (*European Economic and Monetary Union* atau EMU). Dalam Perjanjian Maastricht 1993, EMU diatur dalam titel VI mengenai *Economic and Monetary Policy*, yang dirancang untuk mewujudkan tahap akhir integrasi ekonomi Eropa sebagai langkah menuju Uni Politik Eropa. Titel VI Perjanjian Maastricht terkait dengan 2 masalah pokok yang diharapkan dapat mendorong integrasi yang lebih mendalam dalam UE (terutama dalam aspek ekonomi), yaitu:

1. Masalah wawasan ekonomi, bahwa perlu ditingkatkan kepedulian negara-negara UE akan *common concern* atau masalah bersama.
2. Masalah pendalaman di sektor institusi, bahwa Perjanjian Maastricht memberi kekuasaan yang lebih besar pada Komisi UE dan Parlemen UE dalam menangani persoalan ekonomi khususnya.

Secara garis besar integrasi ekonomi UE tampak dalam :

#### 1. *Free Trade Area*

UE merupakan kawasan dimana negara-negara anggotanya melaksanakan perdagangan bebas dengan mengurangi hambatan kuantitatif perdagangan bagi negara-negara anggota, sedangkan untuk negara bukan anggota tergantung pada keinginan negara-negara UE, apakah ingin menerapkan hambatan atau tidak.

#### 2. *Custom Union*

Antara negara-negara anggota UE diberlakukan bebas hambatan ekonomi perdagangan, sedangkan untuk negara bukan anggota diberlakukan hambatan-hambatan yang ditentukan bersama, seperti yang diterapkan dalam *Common Agricultural Policy* (CAP).

### 3. *Internal Commodity Market*

Semua hambatan perdagangan telah dihilangkan untuk negara anggota, sedangkan untuk negara bukan anggota diberlakukan hambatan yang ditentukan bersama, jadi mekanismenya sama dengan *Custom Union*.

### 4. *Common Market*

Memfalisasi pergerakan atau mobilitas faktor produksi dan aset ekonomi lainnya, penanaman investasi asing, membuka bisnis di luar negeri dan bebas bekerja di luar negeri (dalam satu wilayah UE) menjadi ciri utama dalam sistem ini.

### 5. *Monetary Union*

Penggunaan mata uang yang sama, yaitu Euro, dan mengacu pada kebijakan moneter bersama.

### 6. *Economic Union*

Kebijakan lebih lanjut dari *Monetary Union*, dimana kebijakan ekonomi dari negara-negara anggota telah dikoordinasikan melalui UE, selain itu juga terkait dengan kebijakan fiskal bersama.

## 2.3 UE Pasca Perjanjian Maastricht

Secara garis besar, perjalanan sejarah terbentuknya UE bisa diringkas sebagai berikut :

9 Mei 1950 --- Robert Schuman, Menteri Luar Negeri Perancis, mengemukakan ide untuk membentuk suatu organisasi dalam menangani persoalan sumber produksi batu bara dan besi baja Eropa

18 April 1951 --- Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Perancis dan Luxemburg menandatangani perjanjian Paris untuk membentuk organisasi *European Coal and Steel Community* (ECSC). Keenam negara inilah yang menjadi pioner pendiri UE, yang bisa disebut sebagai UE-6.

25 Maret 1957 --- Penandatanganan perjanjian Roma sebagai dasar pendirian *European Economic Community* (ECC) dan *European Atomic Energy Community* (EAEC). Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 1958.

1 Januari 1973 --- Masuknya Denmark, Inggris dan Irlandia dalam keanggotaan UE, sehingga menjadi UE-9.



## Digital Repository Universitas Jember

1 Januari 1981 --- Yunani masuk sebagai anggota baru, menjadi UE-10.

1 Januari 1986 --- Portugal dan Spanyol masuk sebagai anggota baru, menjadi UE-12.

1 Juli 1987 --- Pemberlakuan Akta Tunggal Eropa sebagai konsekuensi perkembangan ECC yang resmi dirubah namanya menjadi *European Community* (EC).

7 Februari 1992 --- Perjanjian UE ditandatangani di Maastricht yang kemudian dikenal juga sebagai Perjanjian Maastricht. Berlaku sejak 1 November 1993. Secara resmi nama *European Union* (EU) dipakai untuk menggantikan nama organisasi sebelumnya, Masyarakat Eropa atau *European Community* (EC).

1 Januari 1995 --- Austria, Finlandia dan Swedia masuk sebagai anggota, menjadi UE-15<sup>33</sup>.

Perjanjian Maastricht membuahakan suatu nama Uni Eropa sebagai suatu organisasi regional Eropa yang semakin memantapkan keberadaannya di dunia Internasional. Adapun tujuan utama dari UE ini adalah :

1. membangun masyarakat Eropa (atas dasar penghargaan terhadap HAM, kebebasan bergerak, hak sosial dan politik dan sebagainya).
2. memastikan pelaksanaan kebebasan, keamanan dan keadilan (dengan mengembangkan kerjasama dalam wilayah hukum dan persoalan dalam negeri antara negara-negara anggota UE).
3. memantapkan peranan UE di dunia (melalui pelaksanaan Kebijakan Keamanan dan Politik Luar Negeri Bersama yang menunjukkan mereka sebagai suatu entitas politik di mata dunia)<sup>34</sup>.

Setelah Perjanjian Maastricht, kini, UE merupakan suatu organisasi regional Eropa yang terdiri dari 15 negara anggota yang bersatu untuk bekerjasama menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Mereka membentuk blok perdamaian terbesar di dunia, sekitar 375 juta warga negara Eropa bergabung bersama dan bekerjasama mengatasi persoalan bersama<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> *European Union News Letter*, no.2, Delegation of the European Commission to Indonesia, Singapore and Brunei Darussalam, Jakarta, 2001, hal 5

<sup>34</sup> *The European Union at a glance*, [www.Eu\\_atglance.htm](http://www.Eu_atglance.htm)

<sup>35</sup> *Panorama of the European Union*, op. Cit



## Digital Repository Universitas Jember

Kawasan Eropa memang terdiri dari berbagai macam tradisi dan budaya, tetapi memiliki nilai-nilai yang sama. Keberagaman kesejahteraan, populasi, budaya, tradisi politik, sejarah dan lain-lain antara negara-negara anggota UE bukanlah hendak dihilangkan. UE tidak ditujukan untuk mengikis karakteristik masing-masing anggota, melainkan lebih menitikberatkan pada pembentukan pondasi nilai-nilai yang disepakati bersama tentang kebebasan, demokrasi, dan HAM. Tujuan utama dibentuknya UE adalah untuk membentuk kerjasama lebih erat yang pernah ada antara orang-orang Eropa, dimana sebisa mungkin pendekatan lebih ditujukan pada warganegara negara anggota, tidak hanya pada level pemerintahan. Diharapkan dengan UE, tercipta suatu persatuan yang lebih erat diantara rakyat Eropa, yang salah satu indikatornya bisa dilihat dari proses pengambilan keputusan yang sedapat mungkin diambil dengan lebih mendekati warganegara (berbasis pada suara rakyat Eropa).

### 2.3.1 Kekuatan Integrasi

Pada awalnya memang keberadaan organisasi UE ini hanya terkait dengan persoalan perdagangan dan ekonomi, tetapi UE sekarang telah sepakat untuk merambah ke persoalan penting yang lain. Dengan fenomena ketergantungan antar negara pada abad 21 ini secara otomatis akan turut mendorong orang Eropa untuk lebih *inien* bekerjasama dalam suatu semangat toleransi dan solidaritas dalam berbagai bidang; politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan dan sebagainya.

UE telah bekerjasama dalam kesatuan politik selama hampir 50 tahun, dan mengalami tantangan yang sedemikian hebatnya terutama pada tahun-tahun terakhir integrasi dalam Perjanjian Maastricht. Dengan integrasi, UE percaya dapat menjadi kekuatan kolektif yang mampu mengimbangi kekuatan AS di dunia Internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Komisi Eropa, Romano Prodi, bahwa salah satu tujuan dari UE adalah untuk menciptakan kekuatan *superpower* di wilayah Eropa yang dapat menyamai AS<sup>36</sup>. Lebih lanjut, jika UE mampu mengembangkan keanggotaannya ke seluruh wilayah benua Eropa, sangat

<sup>36</sup> Charles A. Kupchan, *Europe, the End of the West*, The Atlantic Monthly, Vol. 290, No. 4, November 2002, hal 44



mungkin sekali UE mampu memperluas wilayah pengaruhnya ke Euroasia dan lebih luas lagi, dunia. Seperti prinsip AS ketika berlangsung perang dingin, menguasai *heartland* Euroasia sebagai langkah awal untuk menguasai dunia.

UE memperkuat ikatan kebersamaan dan identitas dalam satu nama UE, membentuk konstitusi bersama, membangun kekuatan pertahanan keamanan sendiri yang terpisah dari kepentingan negara lain (dalam hal ini AS), dan mengusahakan satu suara dalam arena diplomatik Internasional. Tekad UE pada tahun 1999 untuk membentuk kebijakan politik luar negeri sendiri yang terkait dengan kekuatan militer dalam kondisi dunia yang unilateral menjadi kekuatan diplomatik tersendiri bagi UE dalam menangani persoalan di wilayah yang bermasalah, seperti wilayah Timur Tengah, Balkan dan sebagainya. Hal ini akan semakin ditunjang dengan kekuataan satu suara UE dalam keanggotaan badan organisasi Internasional, seperti misalnya PBB dan WTO.

Populasi mayarakat UE sekitar 376, 4 juta jiwa dengan nilai perdagangan dan GNP-nya berkisar 20 % dari total nilai perdagangan dan GNP dunia. Nilai import dan eksport UE mencapai 20 % nilai import dan eksport dunia. Jika negara-negara di wilayah Eropa semuanya masuk ke dalam keanggotaan UE, maka UE besarnya akan sama dengan wilayah gabungan antara AS, Kanada, Jepang, Australia dan New Zealand<sup>37</sup>.

Adanya optimisme bahwa UE dapat meningkatkan GNP-nya sampai 5 % untuk 6 sampai 8 tahun ke depan walaupun kondisi perekonomian dunia dalam keadaan resesi menunjukkan adanya harapan akan kemampuan UE untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi dunia yang bisa menyaingi kekuatan ekonomi Jepang dan AS. Hal ini ditunjang dengan tingginya *merger* perusahaan MNC (*Multi National Cooperation*) milik UE dan kemajuan teknologi industri di bidang manufaktur, teknologi tinggi dan perbankan UE<sup>38</sup>. Sebagai contoh kecil, Airbus UE menjadi produsen pesawat terbang komersil terbesar di dunia yang sebelumnya dipegang oleh Boeing AS. Perusahaan telephon seluler UE, Nokia,

<sup>37</sup> Ambassador Hugo Paemen, *The European Union and The United States in the New Millenium*, [www.nyu.edu/globalbeat/emu/Paemen102298.html](http://www.nyu.edu/globalbeat/emu/Paemen102298.html)

<sup>38</sup> Barbara A. Fliess dan Elke Thiel, *Economic Cooperation Offers Global Benefits*, *Forum For Applied Research and Public Policy* 9, Summer 1994, 52-56.



merupakan produsen terbesar di dunia<sup>39</sup>. Itu hanyalah 2 dari sekian banyak perusahaan UE yang menjadi pesaing utama perusahaan AS di panggung perekonomian dunia.

UE yang makin membayangkan-bayangi kekuatan AS juga terlihat dari besarnya anggaran UE yang berkisar \$ 8 milyar, tidak jauh berbeda dengan AS yang mencapai \$ 10 milyar. Terlebih lagi, Euro akan mengancam dominasi dollar AS. Selain itu, bersama dengan *Federal Reserve* AS, Bank Central UE mengontrol sistem moneter Internasional<sup>40</sup>. Dalam bidang lain, UE telah mampu membangun jaringan satelit sendiri yang disebut Galileo, suatu langkah pasti UE untuk mengurangi ketergantungannya terhadap AS dalam hal teknologi luar angkasa<sup>41</sup>. Begitu pula pembentukan Pasukan Gerak Cepat Eropa yang berkekuatan 60 ribu personel merupakan usaha lain dari UE untuk mengurangi ketergantungan militernya pada AS<sup>42</sup>.

Dari beberapa contoh tersebut tampak bahwa integrasi menjadi suatu sarana yang penting untuk meningkatkan kekuatan UE dalam mencapai ambisi Internasionalnya, menjadi aktor *independent* tanpa harus dibayangkan-bayangi oleh AS, bahkan kalau bisa menjadi kekuatan dunia yang mampu menyaingi AS. Kenyataan keberhasilan UE seiring dengan pesatnya kemajuan ekonominya terutama, dapat mendorong munculnya kekuatan regional Eropa yang *independent* yang notabene bisa menyaingi AS sebagai aktor hegemon. Jika masyarakat Eropa menjadi kohesif secara politik, UE akan memiliki sumber-sumber populasi, kekayaan ekonomi, teknologi dan kekuatan militer yang aktual dan potensial sebagai kekuatan yang sangat unggul dari abad XXI. Jika abad XXI bukan merupakan abad AS, besar kemungkinannya adalah abad Eropa<sup>43</sup>. Maksudnya, jika di abad XXI UE dengan keorganisasiannya semakin memantapkan eksistensinya di kancah Internasional dan jika AS tidak mampu memperbaiki citranya yang kian lama kian menurun di mata Internasional, tentunya akan besar

<sup>39</sup> Charles A. Kupchan, op. Cit, hal 43

<sup>40</sup> ibid, hal 42

<sup>41</sup> ibid, hal 43

<sup>42</sup> *Beban Berat Uni Eropa*, Kompas, 10 Desember 2000

<sup>43</sup> Samuel P. Huntington, *The US... Decline or Renewal?*, Foreign Affairs 1967, winter 1988-1989, hal 93



kemungkinan UE akan mengambil alih kepemimpinan AS di dunia dan menikmati superioritas yang dimiliki AS di abad lalu, abad XX.

Hal yang menimbulkan rasa percaya diri UE akan kekuatannya itu didasari pada kenyataan bahwa meskipun secara geografis Eropa hanya seperempat luas wilayah AS, Eropa memiliki populasi yang sebanding dengan AS. Ekonomi Eropa sedikit lebih kecil dari AS, namun peran UE lebih besar dalam perdagangan dunia. Angkatan bersenjata dari 15 negara anggota sedikit lebih besar dari AS. Modernisasi kekuatan nuklir Perancis dan Inggris saja menghasilkan kurang lebih 1200 senjata nuklir pada awal tahun 1990-an<sup>44</sup>. Ideologi Eropa sebanding dengan seruan ideologi AS. Kebudayaan Eropa dikenal sebagai kebudayaan yang menarik di dunia. Eropa sebagai pelopor penting dalam pranata Internasional dengan menciptakan filsuf dan ahli politik yang pikirannya telah diikuti sepanjang zaman. Eropa menjadi peran sentral dalam PBB dan dalam pranata-pranata ekonomi Internasional. Eropa pun menjadi sumber pembaharu dunia dengan menciptakan teknologi-teknologi baru dalam bidang otomotif, teknologi ruang angkasa dan sebagainya. Jika UE mampu memanfaatkan kekuatan potensialnya ini tentunya UE akan mampu tampil sebagai kekuatan dunia, melebihi AS.

### 2.3.2 Keanggotaan Uni Eropa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sejarah terbentuknya UE berakar dari Perang Dunia yang *notabene* berpusat pada kawasan Eropa. UE merupakan suatu proses perjalanan dalam mencari suatu bentuk integrasi Eropa yang diharapkan dapat mencegah terjadinya peperangan yang menghancurkan, tidak hanya materi tetapi juga korban manusia, yang pernah menghantui mereka selama ini. Ide tersebut untuk pertama kalinya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman, pada tanggal 9 Mei 1950, yang kemudian tanggal ini diperingati sebagai hari lahirnya UE. Sampai sekarang, kerjasama secara bertahap telah berkembang dan meluas dan bahkan terus mengikuti keinginan mayoritas orang Eropa terhadap perkembangan UE itu sendiri. Perubahan terakhir terjadi pada Perjanjian Amsterdam tahun 1997 yang menjadi

<sup>44</sup> Joseph S. Nye Jr., *Memimpin Dunia: Sifat Kekuatan Amerika yang sedang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal 144



dasar yang kuat bagi keberadaan UE. Lebih dari itu, UE semakin memperluas keanggotaannya setelah 13 negara mengajukan proposal untuk masuk menjadi anggota baru UE, hal mana tak mungkin terjadi jika UE tidak memantapkan eksistensinya sebagai suatu organisasi regional yang kuat.

Setelah mengawali kesuksesannya sejak Perjanjian Maastricht, dimana ada penambahan keanggotaan dalam UE, yaitu dengan masuknya Austria, Finlandia dan Swedia yang melengkapi UE-15 pada tahun 1995, UE semakin memantapkan keorganisasiannya dengan kesuksesan-kesuksesan yang diraihinya. Akibatnya, citra UE di mata negara-negara Eropa yang lain meningkat, dimana UE dipercaya sebagai suatu organisasi regional Eropa yang mampu membawa negara-negara anggotanya menuju perdamaian dan kesejahteraan atas dasar prinsip politik-demokrasi dan ekonomi-pasar bebas. Karenanya banyak negara-negara Eropa yang lain yang ingin masuk menjadi anggota UE.

Pada awalnya memang UE terbatas pada keanggotaan negara-negara Eropa Barat. Namun, sejak Perang Dingin berakhir dimana tembok pemisah antara Eropa Timur dan Eropa Barat sudah runtuh, maka UE terbuka bagi negara-negara di belahan benua Eropa secara keseluruhan; Eropa Tengah, Eropa Timur dan negara-negara Mediterania.

Untuk masuk menjadi anggota UE ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Antara lain; negara tersebut harus berada di dalam kawasan Eropa, memiliki kondisi sosial politik yang stabil, sistem politik yang demokratis yang menjamin pelaksanaan hukum, penghormatan terhadap HAM dan perlindungan terhadap kaum minoritas, serta memiliki ekonomi pasar yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan rakyat dan mendorong terlaksananya hukum UE<sup>45</sup>.

Sampai Desember 2002, terdapat 13 negara yang mengajukan proposal untuk menjadi anggota UE, diantaranya: 5 negara Eropa Tengah bekas komunis USSR (Estonia, Hungaria, Polandia, Republik Checko, Slovenia), 5 negara Eropa Timur (Bulgaria, Latvia, Lithuania, Republik Slovakia, Rumania) dan 3 negara

---

<sup>45</sup> *Panorama of the European Union*, op. Cit.



Mideterania (Cyprus, Malta, Turki)<sup>46</sup>. Semuanya, kecuali Turki, sedang dinegosiasikan keanggotaannya oleh UE. UE menolak keanggotaan Turki, karena menganggap Turki belum memenuhi kriteria untuk menjadi anggota UE. Salah satunya masalah wilayah, Turki termasuk dalam wilayah Asia, bukan Eropa. Perkembangan terbaru, tidak menutup kemungkinan Norwegia dan Switzerland pun mengajukan proposal untuk menjadi anggota UE dalam waktu dekat ini<sup>47</sup>.

Perluasan keanggotaan UE dirasa sangat penting mengingat tujuan dari UE semula, menciptakan perdamaian dan kesejahteraan rakyat Eropa dengan dilandasi kehidupan yang demokratis dan pengakuan HAM di seluruh Eropa, yang selanjutnya akan berdampak pada perdamaian dunia yang lebih luas. Tujuan dari perluasan keanggotaan UE tak lain adalah untuk menciptakan kesatuan di seluruh wilayah benua Eropa yang dirasa sangat kondusif bagi penciptaan perdamaian dan demokrasi serta memungkinkan masyarakatnya maju dan sejahtera dalam konteks integrasi Eropa. Semakin bertambah keanggotaannya, semakin terbuka jalan untuk menciptakan perdamaian dunia yang berawal dari perdamaian dan kesejahteraan negara-negara di kawasan Eropa.

---

<sup>46</sup> [www.europa.eu.int/comm/enlargement/index-en.html](http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/index-en.html)

<sup>47</sup> David R. Gress, *Agenda 2000: The Weak Heart of Postmodern Europe*, Orbiss, Vol. 41, Winter 1997, hal 61

### III. KERJASAMA UNI EROPA-AMERIKA SERIKAT

#### 3.1 Beberapa Fakta Penting

Kerjasama UE-AS terjalin dengan basis kepentingan yang kuat antara negara-negara anggota UE dan AS. Kenyataannya, di bidang ekonomi, arus perdagangan trans-atlantik dan penanaman modal UE-AS merupakan yang terbesar di dunia dan hampir mendekati \$1 milyar setiap harinya. Kerjasama UE-AS tercatat sebesar 37 % nilai perdagangan barang di dunia dan sekitar 45 % perdagangan jasa di dunia<sup>48</sup>.

Beberapa fakta lain menunjukkan adanya jalinan kerjasama UE dan AS yang bisa dilihat dari berbagai macam indikator:

1. komunikasi dan transportasi
  - a. 500 ribu penumpang pesawat terbang melintasi samudera Atlantik setiap harinya, dari UE ke AS atau sebaliknya.
  - b. Masyarakat Eropa dan AS mengadakan hubungan telepon 1 juta kali per hari
  - c. Pengiriman pesan lewat e-mail antar UE-AS mencapai angka 1,4 milyar setiap harinya.
2. bisnis dan investasi
  - a. tahun 2000, tercatat 46 % investasi luar negeri AS ke UE
  - b. tahun 1999, negara-negara UE tercatat mengadakan 60 % investasi luar negeri ke AS
3. perdagangan
  - a. \$ 1 milyar tercatat tiap harinya sebagai angka perdagangan transatlantik dan aliran modal antar UE-AS (dalam hal ini hubungan perdagangan UE-AS merupakan hubungan perdagangan dan investasi bilateral terbesar di dunia)
  - b. perekonomian UE-AS secara bersama-sama tercatat menguasai hampir setengah perekonomian dunia

<sup>48</sup> *US Relations with the European Union*, [www.useu.be/TransAtlantic/index.html](http://www.useu.be/TransAtlantic/index.html)



- c. AS merupakan tujuan utama ekspor UE dan merupakan sumber terbesar import UE
  - d. tahun 2000, tercatat 24,8 % nilai ekspor UE mengalir ke AS, dan 19,2 % nilai import UE berasal dari AS
  - e. tahun 2000, tercatat 21 % nilai ekspor AS mengalir ke UE dan 18 % nilai import AS berasal dari UE
  - f. Dialog Bisnis Transatlantik sebagai salah satu proses informal antara perusahaan dan asosiasi bisnis UE dan AS mampu menghasilkan perumusan kebijakan perdagangan oleh Komisi Eropa dan Pemerintah AS yang lebih lanjut menjadi dasar kerjasama trans-atlantik.
4. Lain-lain
- a. UE merupakan tujuan utama bagi pelajar AS untuk melakukan studi banding. Pada tahun akademik 1998/1999, tercatat sekitar 68 % (lebih dari 88 ribu) pelajar AS yang belajar ke UE.
  - b. UE merupakan negara kedua setelah Asia dalam jumlah pelajar terbanyak yang belajar di AS. Pada tahun akademik 1999/2000, tercatat sekitar 15 % pelajar dan ilmuwan UE di institusi pendidikan AS.
  - c. Pada tahun akademik 1999/2000, UE tercatat memiliki 36 % ilmuwan di AS atau sekitar 27.214 orang Eropa yang belajar di institusi pendidikan AS.
  - d. Pertukaran Pemuda dan Pelajar dalam Kongres Bundestag menjadi sponsor pertukaran pelajar SMU dan profesional muda kedua negara<sup>49</sup>.

Dari sini, dapat diketahui bahwa begitu besar ketergantungan antara UE-AS dalam berbagai bidang yang memungkinkan mereka untuk menjalin kerjasama yang lebih erat, tentunya didasari oleh kepentingan yang kuat dari masing-masing pihak terhadap sesamanya.

### 3. 2 Pemantapan Kerjasama Pasca Perjanjian Maastricht

Hubungan Trans-Atlantik antara UE-AS yang sebelumnya secara garis besar berlandaskan pada Doktrin Truman (1947), Marshall Plan (1947) serta

<sup>49</sup> Factsheet, [www.Germany-info.org/relaunch/politic/german-us/facts.html](http://www.Germany-info.org/relaunch/politic/german-us/facts.html)

Deklarasi Trans-atlantik (23 November 1990), setelah Perjanjian Maastricht 1993, kerjasama UE-AS lebih dimantapkan lagi melalui *New Transatlantic Agenda* (3 Desember 1995), *Transatlantic Economic Partnership* (Mei 1998) serta Bonn Declaration (21 Juni 1999). Pemantapan kerjasama ini sejalan dengan semakin mantapnya keorganisasian UE atas dasar Perjanjian Maastricht. Setelah Perjanjian Maastricht, UE secara prinsipil memiliki nuansa keorganisasian yang berbeda dengan ME, sehingga dirasa perlu untuk memperbarui kerjasama UE-AS.

### 3. 2. 1 Dasar Kerjasama Uni Eropa-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Maastricht

#### 3. 2. 1. 1 *New Transatlantic Agenda*

*New Transatlantic Agenda* (NTA) ditandatangani pada tanggal 3 Desember 1995 yang bersamaan penandatanganannya dengan *EU-US Joint Action Plan* (suatu pedoman bagi UE-AS menghadapi abad XXI untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam berbagai masalah, mulai dari pemberantasan perdagangan obat bius sampai pada pengontrolan pemborosan anggaran PBB)<sup>50</sup>. NTA menjadi kerangka kerjasama kemitraan UE-AS yang meliputi 4 agenda utama;

- a. memperjuangkan tercapainya perdamaian dan stabilitas Internasional, demokrasi serta pembangunan di seluruh dunia.

Beberapa contohnya tampak dalam kerjasama UE-AS dalam mengatasi proses perdamaian di Yugoslavia dan di Timur Tengah, kepemimpinan bersama dalam usaha membangun kembali Bosnia-Herzegovina, membantu Rusia dan negara-negara Eropa Tengah dalam usahanya memperkuat demokrasi, bekerjasama dalam persoalan kemanusiaan serta pelaksanaan diplomasi yang *preventive*.

- b. merespon terhadap semua perubahan global.

Beberapa contohnya tampak dalam kerjasama UE-AS dalam bidang pelestarian lingkungan, kesehatan umum, penguatan hukum, menanggulangi kejahatan Internasional dan bahaya narkotik.

---

<sup>50</sup> *AS-Uni Eropa Tandatangani Kerjasama Ekonomi Politik*, Kompas, 4 Desember 1995, hal 7



- c. ikut terlibat dalam ekspansi perdagangan dunia dan meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi yang lebih akrab.

Beberapa contohnya tampak dalam kerjasama UE-AS dalam mendorong perkembangan *World Trade Organisation* (WTO), memperkuat sistem perdagangan multilateral untuk mengurangi kesenjangan aliran barang dan jasa, pembentukan *New Transatlantic Marketplace* yang ditengarai mampu menjadi kaitan liberalisasi ekonomi transatlantik lebih jauh.

- d. membangun "jembatan" melintasi samudera Atlantik.

Agenda ini meliputi perluasan perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan pertukaran ilmuwan antara UE-AS untuk memastikan pengertian publik masing-masing pihak dan mendorong hubungan trans-atlantik itu sendiri. Agenda ini lebih menitikberatkan pada mekanisme dialog sebagai wujud awal terjalinnya suatu kerjasama UE-AS yang lebih jauh lagi, karena dialog disini merupakan dialog pada level masyarakat sipil. Misalnya, *Transatlantic Business Dialogue*, *Transatlantic Labor Dialogue*, *Transatlantic Consumer Dialogue* (dimana ketiganya sangat penting bagi perkembangan aliran perdagangan, investasi, modal dan teknologi melintasi samudera Atlantik), selain itu ada juga *Transatlantic Environmental Dialogue* serta *Transatlantic Legislative Dialogue*<sup>51</sup>. Tujuan utama diadakannya dialog-dialog seperti ini adalah memungkinkan aktor individu memberikan opini mereka yang dapat menjadi masukan tersendiri dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kedua pihak terkait dengan hubungan trans-atlantik, hal mana tentunya akan sangat kondusif bagi perkembangan kerjasama UE-AS itu sendiri.

*New Transatlantic Agenda* ini pada dasarnya dilandasi oleh *Transatlantic Declaration*. *Transatlantic Declaration* yang ditandatangani pada tanggal 23 November 1990 menjadi prinsip dasar jalinan konsultasi dan mekanisme kerjasama antara UE-AS yang lebih luas, termasuk di dalamnya menyangkut pertemuan reguler dan dialog antar Menteri Luar Negeri serta pertemuan tingkat Presiden kedua pihak yang diadakan dua kali dalam setahun<sup>52</sup>. Tujuan utamanya

<sup>51</sup> Overview, [www.europa.eu.int/comm/external\\_relations/us/info/index.htm](http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/us/info/index.htm)

<sup>52</sup> *US Relations with the European Union*, op. Cit



adalah untuk mengembangkan mekanisme baru konsultasi dan kerjasama yang lebih mendalam antar kedua belah pihak. Dengan *Transatlantic Declaration*, kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan bidang-bidang yang lain pun semakin meningkat.

Dengan dilandasi *Transatlantic Declaration* inilah *New Transatlantic Agenda* terfokus pada 4 area utama:

1. dalam konteks wilayah
  - a. isu-isu regional, misalnya pembentukan Eropa Tenggara, proses perdamaian Timur Tengah, proses reformasi di negara bekas Uni Sovyet dan sebagainya.
  - b. permasalahan global, misalnya memerangi terorisme Internasional, perdagangan narkotik dan obat-obatan terlarang, kejahatan yang terorganisasi, perlindungan alam, non-proliferasi nuklir dan sebagainya.
2. dalam konteks bidang yang dikaji
  - a. bidang ekonomi, misalnya meningkatkan perdagangan dan komersial, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dengan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan serta penguatan kerjasama WTO.
  - b. bidang politik, misalnya memperkuat proses pembuatan keputusan dalam hubungan trans-atlantik dengan mengutamakan dialog orang per orang dengan mengikut sertakan kelompok-kelompok sosial yang relevan. Seperti dialog antara kelompok peduli lingkungan, pelaku bisnis atau pengusaha, konsumen serta tenaga kerja antara 2 pihak (UE dan AS) maupun forum diskusi antara anggota Parlemen Eropa dan Kongres AS<sup>53</sup>.

Dari sini tampak bahwa *New Transatlantic Agenda* merupakan pemantapan kerjasama lebih lanjut antara UE – AS sejak diberlakukannya Perjanjian Maastricht sebagai perluasan kerjasama yang sebelumnya tertuang dalam *Transatlantic Declaration*.

---

<sup>53</sup>*Relations between the EU and the USA*, April 2002, [www. Auswaertiges-aa.de/www/en/laenderinfos/laender/laender-ausgabe.html](http://www.Auswaertiges-aa.de/www/en/laenderinfos/laender/laender-ausgabe.html)



### 3. 2. 1. 2 *Transatlantic Economy Partnership*

*Transatlantic Economy Partnership* (TEP) yang ditandatangani pada bulan Mei 1998 dalam pertemuan tahunan UE-AS merupakan kelanjutan dari NTA. TEP yang sarat dengan aspek ekonomi ini menyangkut hubungan bilateral maupun multilateral<sup>54</sup>. Bilateral, TEP bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan teknik perdagangan kedua pihak dan untuk menstimulasi liberalisasi persetujuan multilateral dengan mengedepankan isu-isu perdagangan Internasional. Multilateral, terfokus pada kepentingan liberalisasi perdagangan dalam keanggotaan WTO untuk memperkuat perdagangan dunia. Hal ini ditindaklanjuti dengan usaha untuk menyatukan sikap mengenai isu-isu buruh, pelaku bisnis, lingkungan dan konsumen. Dengan kata lain, pada intinya TEP bertujuan untuk membuka pasar dan mengurangi hambatan perdagangan antara negara-negara UE dan AS (secara bilateral) dan dalam keanggotaan WTO (secara multilateral).

### 3. 2. 1. 3 *Bonn Declaration*

Lebih lanjut, pada tanggal 21 Juni 1999 diadakan pertemuan UE-AS di Bonn, Jerman, yang menghasilkan **Deklarasi Bonn** yang menjadi dasar terjalannya kemitraan penuh dan sederajat antara UE-AS di bidang politik, ekonomi dan masalah keamanan dalam abad 21<sup>55</sup>. Pada saat yang sama UE dan AS menyetujui prinsip-prinsip dan mekanisme yang menjembatani kedua pihak bila sewaktu-waktu terjadi perbedaan antar keduanya. Hal ini menunjukkan betapa UE-AS menginginkan untuk memperkuat komitmen mereka dalam hubungan trans-atlantik untuk dekade selanjutnya. Terutama dengan didirikannya *The Gothenburg European Council* (Dewan Eropa Gothenburg) pada bulan Juni 2001 dimana untuk pertama kalinya diadakan pertemuan antara Presiden AS dengan seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota UE.

---

<sup>54</sup> *Overview*, op. Cit

<sup>55</sup> *Relations Between the EU and the USA*, op. Cit

### 3. 2. 2 Kerjasama Diplomatik

Hubungan trans-atlantik yang bernuansa politik ditandai dengan dibukanya hubungan diplomatik antara UE-AS yang dimulai tahun 1953, ketika untuk pertama kalinya analis AS dikirim ke *European Coal and Steel Community* (ECSC) dan *European Defence Cooperation* (EDC)<sup>56</sup>. Delegasi Komisi Eropa ke Washington DC, AS, terbentuk pada tahun 1954 dan Misi AS untuk UE terbentuk pada tahun 1961 di Brussel. Tahun 1971, delegasi UE diterima di kantor pemerintahan AS di New York, dan pada tahun yang sama, delegasi UE diterima di kantor Washington dengan memiliki kekebalan penuh seorang diplomat serta hak-hak istimewanya. Delegasi ini merepresentasikan Komisi UE yang bekerjasama dengan pemerintahan AS. Delegasi ini, yang juga bekerjasama dengan institusi Internasional lain di Washington DC, melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinannya yang bermarkas di Brussels.

Dalam perkembangannya terutama setelah Perjanjian Maastricht, hubungan diplomatik ini tampak dalam berbagai pertemuan yang diadakan antara kedua negara yang membahas mengenai isu-isu tertentu. Misalnya pertemuan rutin setahun sekali antara Menteri Sekretaris Negara AS, Menteri Perindustrian dan Perdagangan AS dan Menteri Luar Negeri AS dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan negara-negara UE, Presiden UE dan Komisi UE untuk urusan Perdagangan dan Luar Negeri.

Tercatat beberapa pertemuan antara kedua pihak telah diadakan dalam dekade terakhir ini seperti: *Washington Summit* (5 Desember 1997, 18 Desember 1998, 17 Desember 1999, 18 Desember 2000, 2 Mei 2002), *London Summit* (18 Mei 1998), *Bonn Summit* (21 Juni 1999), *Queluz Summit* (31 Mei 2000), *Goteborg Summit* (14 Juni 2001) dan pertemuan sejenis yang lain<sup>57</sup>. Dari sini tampak bahwa begitu intensnya pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kedua pihak, yang kesemuanya itu tak lain bertujuan untuk memantapkan kerjasama diplomatik dalam kerangka kerjasama trans-atlantik yang telah terjalin selama ini.

<sup>56</sup> *US Relations with the European Union*, op. Cit

<sup>57</sup> *US-EU Agreements*, [www.useu.be/TransAtlantic/index.html](http://www.useu.be/TransAtlantic/index.html)



### 3. 3 Perspektif Uni Eropa-Amerika Serikat terhadap Hubungan Trans-Atlantik

#### 3. 3. 1 Perspektif Uni Eropa

Kesadaran sebagai sesama bangsa senasib yang memiliki dan mewarisi peradaban Barat menjadi salah satu dasar bagi Eropa untuk menjalin kemitraan dengan sekutunya, yang dalam hal ini Amerika Serikat.

##### 3. 3. 1. 1 Amerika Serikat sebagai Stabilisator Keamanan Region

Faktor sejarah dan geo-politik antara AS dan UE telah menciptakan interdependensi keamanan UE terhadap AS yang selanjutnya mempengaruhi struktur *amity-enmity*<sup>58</sup>. Perang Dingin juga mengubah pola hubungan persahabatan-permusuhan dan peran aktor utama di kawasan Eropa serta penciptaan struktur keamanan baru sebagai persoalan internal dalam nuansa transformasi dan interdependensi Eropa. Dalam perspektif UE, AS merupakan aktor prinsip dalam penataan keamanan Eropa terutama setelah USSR hancur. Dalam hal ini, AS mempunyai wilayah pengaruh (*sphere of influence*) karena AS bertindak sebagai payung keamanan Eropa.

Sebenarnya berakhirnya Perang Dingin memunculkan optimisme di negara-negara Eropa akan terciptanya suatu perdamaian di Eropa seiring dengan berakhirnya konflik ideologi dan rezim politik otoriter yang selama ini mengancam stabilitas Eropa. Pelaksanaan sistem politik demokrasi yang sedapat mungkin menghindari adanya kekerasan atau peperangan ikut mendukung terciptanya suasana yang memungkinkan untuk hidup berdampingan secara damai dan *cooperative* antara negara-negara Eropa (sampai memunculkan *sense of European Community*), sehingga sangat besar kemungkinan untuk menciptakan kesejahteraan dan standard hidup yang lebih baik bagi rakyat Eropa.

---

<sup>58</sup> *Amity*, pola hubungan yang didasarkan pada persahabatan murni antara 2 negara atau lebih dengan harapan akan perlindungan dan bantuan dari sahabatnya (saling menguntungkan), sedangkan *enmity*, pola hubungan yang didasarkan pada kecurigaan, permusuhan dan ketakutan. Lihat Barry Buzan, *The Post Cold War Asia Pacific Order*, dalam Andrew Mack dan John Ravenhill, *Pacific Cooperation: Building Economic and Security Regimes in the Asia Pacific Region*, Allen and Unwin Australia Pty. Ltd, Canberra, 1994, hal 33



Namun, ada juga pesimisme bahwa berakhirnya Perang Dingin tidak akan dengan serta merta menciptakan suatu kawasan yang damai di Eropa karena selama ini terdapat konflik tersembunyi antara negara-negara Eropa (apakah itu masalah etnis, perbatasan, ekonomi, dan sebagainya). Selama Perang Dingin mereka bersatu untuk menghadapi musuh bersama (komunisme) atas dasar solidaritas yang kuat antar negara-negara Eropa. Namun, karena musuh bersama sudah hilang, maka solidaritas itu mungkin saja juga hilang dan besar kemungkinan konflik yang selama ini tertutupi oleh isu musuh bersama muncul lagi sebagai suatu persoalan baru. Selain itu, perubahan sistem dunia dari bipolar ke multipolar mempengaruhi mekanisme manajemen konflik di antara negara-negara Eropa yang bertikai, apalagi ditunjang dengan semakin menguatnya Nasionalisme negara-negara Eropa, otomatis akan mempengaruhi stabilitas kawasan, dan lebih lanjut, berdampak pula pada proses integrasi UE.

Nampaknya, pandangan yang terakhir ini tidak terbukti ketika integrasi ME semakin menampakkan hasilnya, dimana melalui pembentukan PTE 1992 yang berlaku tanggal 1 November 1993 berakibat pada membaiknya tingkat perekonomian dan integrasi politik, sehingga kekhawatiran akan terjadinya instabilitas kawasan Eropa tidak terbukti. Kenyataannya, Eropa bersatu dalam satu serikat (*federalized of Europe*) dalam keorganisasian UE dengan mata uang bersama, satu bank sentral, kebijakan sosial bersama dan satu pertahanan keamanan bersama. Lebih lanjut, Eropa yang bersatu dalam keorganisasian UE menjadi aset berharga bagi terciptanya stabilitas dunia dan menghilangkan konflik di kawasan Eropa sendiri khususnya.

Dalam penataan stabilitas kawasan Eropa ini tentunya tidak bisa lepas dari campur tangan AS yang selama hampir 50 tahun telah menempatkan kekuatan militernya di kawasan Eropa untuk menjaga stabilitas kawasan Eropa dari pengaruh atau ekspansi komunis USSR dan untuk mencegah peperangan diantara negara-negara Eropa. Marshal Plan dan NATO telah membuat AS menstabilkan situasi di Eropa. Dengan kenyataan ini, masyarakat Eropa percaya Eropa tidak bisa melepaskan diri dari AS, kestabilan kawasan Eropa akan bisa terwujud dengan campur tangan AS.



Peran yang dimainkan dalam hubungan trans-atlantik merupakan inti dari keamanan Eropa. Dominasi AS di UE tampak dari tampilnya AS sebagai pemeran utama dalam aliansi NATO. Bahkan bisa dikatakan bahwa NATO dapat menjadi salah satu wahana politik AS untuk mengontrol Eropa (tentu saja hal ini akan dibarengi dengan usaha perluasan demokrasi, kepentingan liberalisasi ekonomi dan kepemimpinan global AS). Madeline Albright, menyatakan bahwa NATO tak lain adalah "salah satu elemen untuk mempertahankan kepemimpinan AS di dunia"<sup>59</sup>. Hubungan seperti ini tentunya sarat dengan nuansa hegemoni.

AS hanya akan dapat mempertahankan perimbangan kekuatan di Eropa bila AS mampu menjadi satu kekuatan Eropa dengan membantu perekonomian dan pematapan struktural politik dan sosial masyarakat Eropa, bahkan membantu proses unifikasi Eropa dalam UE. Kebijakan AS mengenai penyatuan Eropa ini seperti yang diungkapkan oleh Presiden Kennedy tahun 1963 di Frankfurt;

Kita senantiasa dan kini pula mengharapkan suatu Eropa yang bersatu dan kuat yang berbicara dengan suara yang sama, yang bertindak dengan kemauan yang sama, suatu kekuatan dunia yang sanggup menghadapi masalah-masalah dunia sebagai partner yang penuh dan sederajat<sup>60</sup>

AS sangat berkepentingan mendorong Eropa menjadi suatu wilayah yang stabil dalam suatu kerangka organisasi UE melalui kerjasama yang intens dalam suatu aliansi Atlantik. Awal periode pasca Perang Dingin, AS mendorong integrasi Eropa untuk mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat adanya konflik tersembunyi diantara mereka yang bisa muncul sewaktu-waktu karena hilangnya musuh bersama, komunis, sehingga aliansi akan lebih mudah antara UE-AS. Adanya kenyataan semacam ini semakin memperkuat kepercayaan UE akan ketergantungannya pada AS sebagai stabilisator keamanan region.

### 3. 3. 1. 2 AS sebagai Hegemonic Power

Runtuhnya USSR tak dapat dipungkiri telah menampilkan AS sebagai pemenang perseteruan dua Blok yang selama hampir setengah abad mengancam

<sup>59</sup> Adapun aliansi yang lain adalah aliansi AS-Timur Tengah serta sekutu minyak di Teluk Persia. Lihat Benjamin Schwarz, *Permanent Interest, Endless Threat: Cold War Continous and NATO Enlargement*, World Policy Journal, Vol. XIV, no. 3, fall 1997, hal 24.

<sup>60</sup> John M. Leddy, dalam CPF Luhulima, *Eropa sebagai Kekuatan Dunia: Limasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 168



stabilitas dan perdamaian dunia. AS pun muncul sebagai satu-satunya kekuatan global dunia yang tidak hanya menikmati superioritasnya tetapi juga supremasinya di dunia Internasional. AS memantapkan posisinya sebagai *hegemonic power* di dunia Internasional, tanpa saingan. *Hegemonic power* itu sendiri bisa diartikan sebagai:

kemampuan (suatu negara) untuk mendikte, atau setidaknya mendominasi ketentuan-ketentuan dan rencana-rencana mengenai bagaimana hubungan Internasional baik politik, maupun ekonomi dilaksanakan<sup>61</sup>

Merujuk pada pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa *hegemonic power* merupakan sebuah negara tunggal yang memiliki kekuasaan besar untuk mengendalikan atau mendominasi negara-negara yang lebih kecil di dalam sistem Internasional yang diciptakannya.

Dengan kondisinya seperti ini, AS semakin sewenang-wenang dalam hubungannya dengan negara-negara lain, tidak terkecuali dengan sekutunya, UE. Dengan kearoganannya, AS merasa memiliki *bargaining power* yang lebih tinggi dibanding negara manapun di dunia, terutama dalam hal untuk mendikte atau mempengaruhi *partnernya* (dalam hal ini UE). Seperti apa yang dikatakan oleh Henry Kissinger pada tahun 1973; "United States is a global power, while Europe is a regional power"<sup>62</sup>. Tentunya pernyataan ini mengundang tanggapan yang serius dari kalangan Eropa karena secara tidak langsung AS telah merendahkan martabat UE sebagai kekuatan regional yang masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan AS. Dari sini tampak bahwa AS ingin menunjukkan kearoganannya di mata sekutunya (UE) dalam sistem unilateral yang ingin diciptakannya.

Namun, dengan perekonomian yang telah pulih dan semangat juang yang hidup kembali, UE tidak lagi bersedia untuk mengikuti politik AS. Seperti yang terjadi pada tahun 1956, ketika itu, Inggris dan Perancis bersatu menentang AS yang mengadakan ekspansi ke Suez yang berakibat pada terjadinya krisis NATO. Hal serupa terjadi lagi, ketika AS dengan penuh semangat mengadakan *invasi*

<sup>61</sup> Joshua S. Goldstein dalam Joseph S. Nye Jr., op. Cit, hal 44

<sup>62</sup> William Wallace, *Europe, the Necessary Partner*, Foreign Affairs, Mei-Juni 2001, hal 22



militer ke Iraq dengan dalih menumpas rezim tirani dan memerangi terorisme, negara Eropa bersatu menentang kebijakan AS ini (walaupun ada beberapa negara yang mendukung AS, tapi secara mayoritas negara-negara UE mengambil sikap yang sama terhadap AS).

### 3. 3. 2 Perspektif Amerika Serikat

Pendekatan *Americanist* tentang politik luar negeri AS menyatakan bahwa AS membutuhkan partner dalam diplomasi global. Peran AS dalam sistem Internasional yang unilateral tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kepemimpinan multilateral dibangun atas dasar negosiasi dan kompromi dengan partner yang menghormati kepemimpinan AS dan memberi kontribusi bagi AS. Keberhasilan untuk mempengaruhi negara lain dalam pencapaian kepentingan Nasionalnya yang diwujudkan dalam kebijakan politik luar negeri tidak akan berhasil tanpa adanya suatu kerjasama kemitraan dengan negara-negara lain di suatu area dimana AS berkepentingan terhadapnya.

Senator AS, Chuck Hagel dalam pidatonya di Universitas Kansas, Manhattan, 20 Februari 2003, menyatakan bahwa, AS saat ini berperan sebagai suatu kekuatan dunia yang bertanggung jawab dalam membentuk suatu dunia yang lebih baik, dan itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh AS, AS harus membangun suatu institusi global dan kerjasama dengan aliansi sekutunya yang akan berbagi kepentingan dan nilai-nilai bersama<sup>63</sup>. Sejalan dengan itu telah tumbuh di benak AS, *the myth of omni potence* (mitos kemahakuasaan), suatu kepercayaan bahwa keberhasilan AS di dalam negaranya yang tidak ada taranya dapat diterapkan dalam hubungan Internasional dengan mengandalkan kemitraan dengan para sekutunya.

Adapun sekutu AS itu adalah Uni Eropa (untuk wilayah Eropa), Jepang (untuk wilayah Asia) dan Israel (untuk wilayah Timur Tengah). Diantara partner AS tersebut, kiranya Uni Eropalah yang merupakan partner paling bisa diandalkan. Dibandingkan Jepang dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu dan juga partner lain yang kiranya cukup sulit untuk diandalkan (Israel

<sup>63</sup> *Unilateralism vs Multilateralism; US-EU Dialogue on Major Issues*, [www.useu.be/BackForth/index.htm](http://www.useu.be/BackForth/index.htm)



dalam usaha perdamaian Timur Tengah misalnya), tampaknya UE tetap menjadi partner utama AS dalam kepemimpinan globalnya menuju sistem Internasional yang unilateral. Bahkan bisa dikatakan bahwa kemitraan terburuk AS dengan salah satu negara anggota UE (misalnya Perancis yang sering menentang kebijakan AS) dianggap masih lebih baik dibandingkan kemitraan terbaik AS dengan negara di Asia (misalnya Jepang). Hal ini disebabkan karena kenyataan dari UE sendiri yang kian waktu kian memantapkan eksistensinya sebagai organisasi negara-negara Eropa yang kuat, terutama setelah diberlakukannya Perjanjian Maastricht yang menjadi dasar terbentuknya uni politik, uni ekonomi dan uni moneter Eropa.

### *3. 2. 2. 1 Uni Eropa sebagai Sekutu Setia Amerika Serikat*

Dalam urutan sejarah evolusinya, kepentingan politik luar negeri AS terletak di belahan bumi sebelah Barat, Eropa. Walaupun dengan cepatnya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di sepanjang pantai Pasifik dan Asia yang selanjutnya menjadi rival UE untuk menarik minat AS, ternyata itu semua tetap tak mampu merubah fakta bahwa UE adalah sekutu AS yang paling dapat diandalkan.

Dari sejarahnya, AS hanya memiliki satu kepentingan dalam negaranya, menghindari penyerangan dari Eropa. Karenanya AS menyandarkan diri pada Inggris, sebagai negara yang berpengaruh di Eropa, untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan dan untuk menghalangi bangkitnya suatu kekuasaan imperialis yang membahayakan posisi AS di dunia Internasional. Ketika Inggris tidak sanggup lagi melanjutkan tugasnya untuk menahan komunis, AS terjun ke dalam kancah perpolitikan Eropa pada bulan Maret 1947 melalui Doktrin Truman dan menjadi pelaku utama Perang Dingin.

Berakhirnya Perang Dingin membuat AS terfokus pada kebijakan untuk memperkuat persekutuan trans-atlantiknya dengan UE, baik itu dalam masalah keamanan maupun ekonomi, terutama untuk menangani persoalan Eropa Timur, sehingga AS memandang UE sebagai "sekutu untuk perdamaian". Bahkan bisa dikatakan AS berusaha membangun hubungannya dengan UE menjadi suatu



jalanan kemitraan yang benar-benar berbagi kepentingan atas dasar tujuan yang sama.

Pada tahun 1995, agenda luar negeri AS antara lain,

1. memajukan sistem perdagangan global yang paling terbuka dalam sejarah
2. membangun sebuah tatanan keamanan Eropa yang baru
3. mencapai perdamaian menyeluruh (komprehensif) di kawasan Timur Tengah
4. melawan penyebaran senjata pemusnah massal
5. memerangi kriminalitas Internasional, narkotik dan teroris<sup>64</sup>

Tampak bahwa UE mendapat prioritas utama dalam agenda luar negeri AS. Dengan agenda ini, diharapkan UE mendukung AS. AS sendiri sebenarnya menginginkan kerjasama dengan UE terjalin dengan baik, terutama dalam segi perekonomian, yang seringkali diindikasikan sebagai salah satu bentuk timbal balik UE terhadap perlindungan keamanan yang diberikan oleh AS selama ini<sup>65</sup>. AS dan UE berbagi nilai sosial dan politik. Sumbangan AS dalam penjagaan stabilitas UE dibayar dengan ketergantungan UE terhadap AS, yang tampak dari kepercayaan UE terhadap nilai atau aturan hukum, politik dan pemerintahan AS, *prestige* demokrasi AS dan pasar bebas AS.

Dari segi ekonomi, kesejahteraan AS memang tidak bisa terlepas dari ketergantungannya dengan negara-negara lain di dunia, tetapi AS tentunya tidak bisa mengatur kealamiahahan perjalanan ekonomi dunia. Untuk menciptakan keteraturan dunia AS membutuhkan sekutu dan selama nilai kapitalisme UE dan kepentingan ekonomi UE sejalan dengan pemikiran AS, maka UE akan menjadi sekutu terbaik AS.

### 3. 2. 2. 2 *Uni Eropa sebagai Rival Amerika Serikat*

Dalam perspektif AS, Eropa di masa lalu menjadi pusat dunia, Eropa mempengaruhi dunia karena Eropa menghasilkan para intelektual dan pemikir dunia penyumbang kebudayaan dunia sekaligus menjadi pusat industri dunia. Dengan kondisi ini, ditunjang dengan keberadaan organisasi regional UE yang ada sekarang ini yang memiliki kekuatan yang cukup signifikan dalam kancah

<sup>64</sup> US Department of States Dispatch, Vol. 6, No. 26, Juni 1995, hal 531

<sup>65</sup> Henry Kissinger dikutip oleh William Wallace, op. Cit, hal. 19



Internasional, AS merasa perlu memegang Eropa sebagai landasan kepentingan AS di wilayah Eropa, yang otomatis juga akan mempengaruhi kepentingan AS di dunia Internasional.

Dalam sejarahnya, selama periode isolasi AS tetap memperlihatkan minat pada pemeliharaan keseimbangan kekuatan di Eropa meskipun tidak memainkan peranan yang aktif. Baru ketika AS merasa terancam oleh kekuatan Jerman (dalam dua kali Perang Dunia) dan Rusia (sejak Perang Dunia II), AS pun merasa perlu untuk melibatkan diri dalam panggung Eropa.

AS ingin menguasai Eropa dan merasa disaingi oleh Uni Sovyet (USSR), karenanya pada PD II AS berusaha mengeliminir dominasi USSR di Eropa. Jika USSR dibiarkan bertindak terlalu jauh tentunya USSR akan dapat menguasai Eropa, itu berarti mengambil kesempatan AS untuk memimpin Eropa. Jika Eropa bisa dikuasai, maka akan mudah kiranya bagi AS untuk menguasai dunia.

AS ingin membentuk *Pax Americana*, suatu sistem Internasional yang dipimpin oleh AS. Bagi AS sendiri, sistem ini mendatangkan manfaat, antara lain: perlindungan militer terhadap sekutu-sekutunya, penggunaan mata uang dollar yang likuid dan terjamin sebagai mata uang Internasional, sistem perdagangan bebas, penyebaran teknologi unggul dari AS dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, posisi AS di dunia Internasional semakin menurun sebagai akibat munculnya Jepang dan UE yang unggul dalam bidang ekonomi dan teknologi (tampak bahwa kompetisi bebas ternyata tidak menjamin suatu negara yang kuat seperti AS, akan tetap dominan untuk selamanya). Terutama setelah tragedi 11 September 2001, *prestige* AS sebagai negara adidaya di dunia Internasional benar-benar meburun. *Pax Americana* pun perlu dipertanyakan lagi. Apalagi dengan munculnya kekuatan UE yang mampu memposisikan dirinya sebagai partner sekaligus *rival* AS dalam kancah perpolitikan Internasional.

Dalam perkembangannya memang AS memandang UE sebagai blok perdagangan terbaik di dunia, bahkan kalau memungkinkan AS ingin masuk di dalam keanggotaan UE. Tetapi di sisi lain, dengan sikap membangkangnya UE, terutama mengenai *burden sharing* dalam penataan ketertiban Internasional, UE merupakan sekutu AS yang paling bandel. Ternyata kemantapan organisasi UE



tidak diiringi dengan kesadaran UE untuk tetap berbagi beban dengan AS. UE cenderung mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan kemajuan ekonominya daripada membagi kekuatan ekonomi itu dengan AS. Suatu hal yang sangat disayangkan AS yang selama ini mengharapkan loyalitas UE sebagai sekutu terbaiknya.



## V. KESIMPULAN

Perjanjian Maastricht merupakan dasar bagi proses integrasi politik dan ekonomi-moneter Uni Eropa menuju suatu masyarakat Eropa yang sejahtera dan damai. Melalui Perjanjian Maastricht, tercipta suatu tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan yang lebih kokoh antara negara-negara di kawasan Eropa yang tergabung dalam suatu organisasi regional Uni Eropa. Tahun 1993 sebagai tahun pemberlakuan Perjanjian Maastricht ini menjadi titik kulminasi bagi UE untuk tampil sebagai aktor hubungan Internasional yang kuat yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Hal ini sedikit banyak turut mempengaruhi hubungan kerjasama antara UE-AS dalam konteks hubungan trans-atlantik yang terjalin selama ini. Dimana kerjasama antara UE-AS pasca Perjanjian Maastricht ternyata menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Kerjasama yang ada sudah tidak sebaik dulu lagi seperti ketika terjadi Perang Dingin, dimana waktu itu UE-AS bahu membahu memerangi musuh bersama, komunisme.

Masalah yang dihadapi UE dalam kaitannya dengan jalinan kerjasamanya dengan AS sebagai implikasi lebih lanjut dari kekuatan yang dimilikinya saat ini pada dasarnya terkait pada persoalan perbedaan persepsi mengenai masalah yang terkait dengan kepentingan bersama, terutama dalam konteks politik, militer dan pertahanan keamanan. Perbedaan persepsi ini selanjutnya berdampak pada perbedaan sikap dalam menentukan arah kebijakan politik, militer, pertahanan keamanan serta kebijakan makroekonomi dan sosial-budaya antara kedua pihak.

Nampaknya, perseteruan dua blok kekuatan besar yang pernah terjadi dalam Perang Dunia dan Perang Dingin kini terulang lagi. Hal ini terlihat dalam nuansa *struggle for power* antara UE-AS yang saling berlomba untuk menjadi yang terkuat di dunia. Beberapa contoh kasus bisa menunjukkan adanya keretakan hubungan antara UE-AS, misalnya *The Helms-Burton Law*, *The Banana Regime*, Protokol Kyoto dan terakhir ini, krisis Iraq.

Dari beberapa contoh kasus tersebut tampak adanya perbedaan kepentingan mendasar antara UE-AS, yaitu berkenaan dengan kepemimpinan global. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, UE ingin menunjukkan pada



dunia bahwa dia mampu menjadi suatu aktor hubungan Internasional yang kuat dan mandiri, terlepas dari bayang-bayang AS, dan karenanya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. UE berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan masa lalunya, sebagai pusat dunia, sumber inspirasi bagi kemajuan dunia yang lebih beradab dan lebih sejahtera. Di lain pihak, AS sendiri masih berambisi untuk mempertahankan citranya sebagai negara adi daya terutama karena posisinya yang semakin menurun di dunia Internasional ketika muncul negara lain yang berpotensi untuk mengambil alih posisi AS itu, salah satunya UE.

Walaupun tidak sampai menimbulkan perang terbuka, perpecahan antara UE-AS dalam tataran kerjasama transatlantik ini sedikit banyak membawa implikasi bagi masa depan perdamaian dunia. Harapan yang ada saat ini, nilai-nilai fundamental yang dimiliki bersama oleh UE-AS akan menjadi semen perekat hubungan kerjasama kedua pihak. Ketergantungan antara UE-AS akan menjadi pondasi yang kuat yang turut mempengaruhi keberlangsungan kerjasama transatlantik. Dan, jika masing-masing pihak bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan yang ada, kerjasama transatlantik yang telah mereka jalin selama ini tentunya akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Anonim, *Negara dan Bangsa jilid IV*, PT. Widyadara, Jakarta, 1990
- Bahar, Saaffroeddin dan AB Tangdiling (Ed), *Integrasi Nasional; Teori, Masalah dan Strategi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Bakti, Ikrar Nusa dkk, *Studia Politika 2*, Yayasan Insan Politik-LIPI, Jakarta, 2000
- Dougherty, James E dan Roberts L. Pfaltzgraff Jr, *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Survey*, Longmen, New York, 1997
- Frankel, Joseph, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1990
- Hauss, Charles, *Comparative Politics; Domestic Responses to Global Challenges*, St. Paul, West 1997
- Holsty, KJ dan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional (Kerangka dan Analisis) edisi ke-4 jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 1988
- Jones, Walter S, *Logika Hubungan Internasional (Persepsi Nasional)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Luhulima, CPF, *Eropa sebagai Kekuatan Dunia; Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Mack, Andrew dan John Ravenhill, *Pasific Cooperation; Building Economic and Security Regimes in the Asia Pasific Region*, Allen and Unwin Australia Pty, Ltd, Canberra, 1994
- Mas' oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994
- McClelland, Charles A, *Ilmu Hubungan Internasional; Teori dan Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1981
- Morgenthau, Hans J, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Anonim, *Negara dan Bangsa jilid IV*, PT. Widyadara, Jakarta, 1990
- Bahar, Saaffroeddin dan AB Tangdiling (Ed), *Integrasi Nasional; Teori, Masalah dan Strategi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Bakti, Ikrar Nusa dkk, *Studia Politika 2*, Yayasan Insan Politik-LIPI, Jakarta, 2000
- Dougherty, James E dan Roberts L. Pfaltzgraff Jr, *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Survey*, Longmen, New York, 1997
- Frankel, Joseph, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1990
- Hauss, Charles, *Comparative Politics; Domestic Responses to Global Challenges*, St. Paul, West 1997
- Holsty, KJ dan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional (Kerangka dan Analisis) edisi ke-4 jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 1988
- Jones, Walter S, *Logika Hubungan Internasional (Persepsi Nasional)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Luhulima, CPF, *Eropa sebagai Kekuatan Dunia; Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Mack, Andrew dan John Ravenhill, *Pasific Cooperation; Building Economic and Security Regimes in the Asia Pasific Region*, Allen and Unwin Australia Pty, Ltd, Canberra, 1994
- Mas' oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994
- Mas' oed, Mochtar, *Kerjasama Ekonomi Regional di Dunia Ketiga*, Diktat kuliah di FISIPOL UGM, Yogyakarta, 1988
- McClelland, Charles A, *Ilmu Hubungan Internasional; Teori dan Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1981

# Digital Repository Universitas Jember

Morgenthau, Hans J, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990

Muchlis M, Edison, *Evolusi Integrasi Menuju Uni Eropa*, LIPI, Jakarta, 1997

Nye, Joseph S Jr, *Memimpin Dunia; Sifat Kekuatan Amerika yang Sedang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992

Palmer, Norman D (Ed), *A Design For International Relation Resources; Scope, Theory, Methods and Relevance*, The American Academy of Politic and Social Science, Philadelphia, 1970

Pareira, Andre H (Ed), *Perubahan Global dan Perkembangan Studi HI*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999

Rachman, Agus R, CPF Luhulima, Edison Muchlis M, *Perjanjian Maastricht; Uni Ekonomi dan Moneter Eropa*, PPW-LIPI, Jakarta, 1996

Rudi, T May, *Studi Strategis (Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin)*, Refika Aditama, Bandung, 2002

Siregar, Edi S, *Kamus Analisa Politik*, CV Rajawali, Jakarta

Soekanto, Sarjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Stoessinger, John G, *The Might of Nations*, Random House Inc, New York, 1961

Sudarsono, Juwono, Zainuddin Djafar dan Fredy B. L. Tobing, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996

Swan, Dennis, *The Economics of Common Market*, Penguin Books, England, 1992

The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1974



## Artikel :

Altman, Roger C dan Charles A. Kupchan, *Arresting the Decline of Europe*, World Policy Journal, Vol. 14, Winter 1997/1998

Anonim, *EU Presses US to Sign Kyoto Protocol*, Oil and Gas Journal, Vol. 96, No. 19, 11 Mei 1998

Bailes, Alyson, *Europe's Defense Challenge; Reinventing the Atlantic Alliance*, Foreign Affairs, Vol. 76, Januari/Februari 1997

Boniface, Pascal, *Reflections on America as a World Power; A European View*, Journal of Palestine Studies XXIX, no. 3, Spring, 2000

Daalder, Ivo H, *Are the US and Europe Heading for Divorce?*, International Affairs, Vol. 77, no. 3, 2001

Flemming, Stewart, *America Rediscovered Europe*, New Statesman, Vol. 126, 14 November 1997

Fliess, Barbara A dan Elkethiel, *Economic Cooperation Offers Global Benefits*, Forum for Applied Research and Public Policy, Vol. 9, Summer 1994

Gordon, Philip H, *Prospects for European Union and Implications for the United States*, SAIS-Review, Vol. 17, Summer/Fall 1997

Gress, David R, *Agenda 2000; The Weak Heart of Postmodern Europe*, Orbis, Vol. 41, Winter 1997

Haseler, Stephen, *Western Europe; A Federal Destiny?*, World Affairs, Vol. 159, Summer 1996

Henning, C. Randall, *Europe's Monetary Union and the United States*, Foreign Policy, No. 102, Spring 1996

Huntington, Samuel P, *The US...Decline or Renewal?*, Foreign Affairs, Vol. 67, Winter 1988-1989

Jakti, Dorojatun Kuntjoro, *Pendekatan Ekonomi Politik (Political Economy); Jembatan di antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik*, Jurnal Ilmu Politik 8, AIPI-LIPI-PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Kennedy, Craig dan Marshall M. Bouton, *The Real Trans-Atlantic Gap*, Foreign Policy, November, 2002

## Digital Repository Universitas Jember

Khalilzad, Zalmay, *Challenges in the Greater Middle East*, Journal of Palestine Studies XXIX no. 8, Spring 2000

Kupchan, Charles A, *Europe, the End of the West*, The Atlantic Monthly, Vol. 290, No. 4, November 2002

Leland, Ted, *Global Climate Change; Two Views on Policy Implications*, Heating Pipe Air Conditioning, Vol. 69, November 1997

Lind, Michael, *Pax Atlantica; the Case for Euramerica*, World Policy Journal, Vol. 13, Spring 1996

Lu Yaokun, Huang Yongjiu, Wang Yange, *West European Political Situation Today; It's Characteristic and Repercussions*, Contemporary International Relation, Vol. 3, No. 12, Desember 1993

Nitschke, Lori, *EU Willingness to Separate Talks on US Exporters' Tax Break Reduces Urgency of Hill Action*, CQ-Weekly, Vol. 58, No. 38, 30 September, 2000

Roy, Joaquin, *The Helms Burton Law; Development, Consequences, and Legacy for Inter-American and European-US Relations*, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 39, Fall 1997

Schmidt, Helmut, *Miles to go: from American Plan to European Union*, Foreign Affairs, Vol. 76, Mei/Juni 1997

Schwarz, Benjamin, *Permanent Interest, Endless Threat; Cold War Continous and NATO Enlargement*, World Policy Journal, Vol. XIV, No. 3, Fall 1997

Sutton, Paul, *The Banana Regime of the European Union, The Caribbean, and Latin America*, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 39, Summer 1997

Tonelson, Alan dan Roberts Gaster, *Our Interests in Europe*, The Atlantic Monthly, Agustus 1995

US Departement of States Dispatch, Vol. 6, No. 26, Juni 1995

Walker, Martin, *Post 9/11; the European Dimension*, World Policy Journal, Vol. 18, No. 4, Winter 2001/2002



Wallace, William, *Europe; the Necessary Partner*, Foreign Affairs, Mei-Juni, 2001

Publikasi:

European News Letter, No. 2, 2001

Kompas, 01 Desember 1995

\_\_\_\_\_, 04 Desember 1995

\_\_\_\_\_, 30 Oktober 1996

\_\_\_\_\_, 25 Juni 1997

\_\_\_\_\_, 19 Mei 1998

\_\_\_\_\_, 12 Desember 1998

\_\_\_\_\_, 06 Januari 1999

\_\_\_\_\_, 12 Maret 1999

\_\_\_\_\_, 10 Desember 2000

\_\_\_\_\_, 31 Maret 2001

\_\_\_\_\_, 04 April 2001

\_\_\_\_\_, 16 April 2001

\_\_\_\_\_, 07 Juni 2001

\_\_\_\_\_, 15 Juni 2001

\_\_\_\_\_, 13 Juli 2001

\_\_\_\_\_, 11 Februari 2002

\_\_\_\_\_, 15 Februari 2002

\_\_\_\_\_, 29 April 2002

\_\_\_\_\_, 06 Juli 2002

\_\_\_\_\_, 15 Juli 2002

# Digital Repository Universitas Jember

Kompas, 11 Februari 2002

\_\_\_\_\_, 13 Februari 2002

\_\_\_\_\_, 19 Februari 2002

\_\_\_\_\_, 12 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 04 April 2003

\_\_\_\_\_, 17 April 2003

*Panorama of the European Union*, Office for Official Publications of the European Communities, Belgia, 2000

The Atlantic Monthly, Vol. 276, No. 2, Agustus, 1995

\_\_\_\_\_, Vol 290, No. 4, November, 2002

The Economist, Vol. 336, 5 Agustus 1995

\_\_\_\_\_, Vol. 354, No. 8160, 4 Maret 2000

\_\_\_\_\_, Vol. 355, 13 Mei 2000

\_\_\_\_\_, Vol. 360, 28 Juli 2001

*The European Union and Indonesia, Building Closer Relations*, European Union Delegation of the European Commission, Jakarta, 2000

## Website:

[www.Auswaertiges\\_amt.de/www/en/laenderinfos/laender/laender\\_ausgabe.html](http://www.Auswaertiges_amt.de/www/en/laenderinfos/laender/laender_ausgabe.html)

[www.eu\\_atglance.htm](http://www.eu_atglance.htm)

[www.eu.hist.htm](http://www.eu.hist.htm)

[www.europa.eu.int/abc/history/indexen.htm](http://www.europa.eu.int/abc/history/indexen.htm)

[www.europe.eu.int/comm/enlargement/index.en.html](http://www.europe.eu.int/comm/enlargement/index.en.html)

[www.europa.eu.int/comm/external\\_relations/us/info/index.htm](http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/us/info/index.htm)

[www.eurunion.org/partner/agenda.htm](http://www.eurunion.org/partner/agenda.htm)



# Digital Repository Universitas Jember

[www.eurunion.org/partner/transatldec.htm](http://www.eurunion.org/partner/transatldec.htm)

[www.eurunion.org/partner/transcorpdocs.htm](http://www.eurunion.org/partner/transcorpdocs.htm)

[www.eurunion.org/profile/facts.htm](http://www.eurunion.org/profile/facts.htm)

[www.germany.info.org/relaunch/politics/german\\_us/facts.htm](http://www.germany.info.org/relaunch/politics/german_us/facts.htm)

[www.heise.de/tp/english/inhalt/te/11641/i.html](http://www.heise.de/tp/english/inhalt/te/11641/i.html)

[www.nyu.edu/globalbeat/emu/Paemen\\_102298.html](http://www.nyu.edu/globalbeat/emu/Paemen_102298.html)

[www.useu.be/BackForth/index.htm](http://www.useu.be/BackForth/index.htm)

[www.useu.be/categories/us\\_and\\_eu\\_enlargement/index.htm](http://www.useu.be/categories/us_and_eu_enlargement/index.htm)

[www.useu.be/TransAtlantic/index.html](http://www.useu.be/TransAtlantic/index.html)

[www.usinfo.state.gov.htm](http://www.usinfo.state.gov.htm)









 Transatlantic Agenda

## Preface

- I. Promoting peace and stability, democracy and development around the world
- II. Responding to global challenges
- III. Contribution to the expansion of world trade and closer economic relations
- IV. Building bridges across the Atlantic

## PREFACE

We, the United States of America and the European Union, affirm our conviction that the ties which bind our people are as strong today as they have been for the past half century. For over fifty years, the transatlantic partnership has been the leading force for peace and prosperity for ourselves and for the world. Together, we helped transform adversaries into allies and dictatorships into democracies. Together, we built institutions and patterns of cooperation that ensured our security and economic strength. These are epic achievements.

Today we face new challenges at home and abroad. To meet them, we must further strengthen and adapt the partnership that has served us so well. Domestic challenges are not an excuse to turn inward; we can learn from each other's experiences and build new transatlantic bridges. We must first of all seize the opportunity presented by Europe's historic transformation to consolidate democracy and free-market economies throughout the continent.

We share a common strategic vision of Europe's future security. Together, we have charted a course for ensuring continuing peace in Europe into the next century. We are committed to the construction of a new European security architecture in which the North Atlantic Treaty Organisation, the European Union, the Western European Union, the Organisation for Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe have complementary and mutually reinforcing roles to play.

We reaffirm the indivisibility of transatlantic security. NATO remains, for its members, the centrepiece of transatlantic security, providing the indispensable link between North America and Europe. Further adaptation of the Alliance's political and military structures to reflect both the full spectrum of its roles and the development of the emerging European Security and Defence Identity will strengthen the European pillar of the Alliance.

As to the accession of new members to NATO and to the EU, these processes, autonomous but complementary, should contribute significantly to the extension of security, stability and prosperity in the whole of Europe. Furthering the work of Partnership for Peace and the North Atlantic Cooperation Council and establishing a security partnership between NATO and Russia and between NATO and Ukraine will lead to unprecedented cooperation on security issues.

We are strengthening the OSCE so that it can fulfil its potential to prevent destabilising regional conflicts and advance the prospect of peace, security, prosperity, and democracy for all.

Increasingly, our common security is further enhanced by strengthening and reaffirming the ties between the European Union and the United States within the existing network of relationships which join us together.

Our economic relationship sustains our security and increases our prosperity. We share the largest two-way trade and investment relationship in the world. We bear a special responsibility to lead multilateral efforts towards a more open world system of trade and investment. Our cooperation has made possible every global trade agreement, from the Kennedy Round to the Uruguay Round. Through the G-7, we work to stimulate global growth. And at the Organisation for Economic Cooperation and Development, we are developing strategies to overcome structural unemployment and adapt to demographic change.

We are determined to create a New Transatlantic Marketplace, which will expand trade and investment



opportunities and multiply jobs on both sides of the Atlantic. This initiative will also contribute to the dynamism of the global economy.

At the threshold of a new century, there is a new world to shape—full of opportunities but with challenges no less critical than those faced by previous generations. These challenges can be met and opportunities fully realised only by the whole international community working together. We will work with others bilaterally, at the United Nations and in other multilateral fora.

We are determined to reinforce our political and economic partnership as a powerful force for good in the world. To this end, we will build on the extensive consultations established by the 1990 Transatlantic Declaration and the conclusions of our June 1995 Summit and move to common action.

Today we adopt a New Transatlantic Agenda based on a Framework for Action with four major goals:

1. Promoting peace and stability, democracy and development around the world. Together, we will work for an increasingly stable and prosperous Europe; foster democracy and economic reform in Central and Eastern Europe as well as in Russia, Ukraine and other new independent states; secure peace in the Middle East; advance human rights; promote non-proliferation and cooperate on development and humanitarian assistance.
2. Responding to global challenges. Together, we will fight international crime, drug-trafficking and terrorism; address the needs of refugees and displaced persons; protect the environment and combat disease.
3. Contributing to the expansion of world trade and closer economic relations. Together, we will strengthen the multilateral trading system and take concrete, practical steps to promote closer economic relations between us.
4. Building bridges across the Atlantic. Together, we will work with our business people, scientists, educators and others to improve communication and to ensure that future generations remain as committed as we are to developing a full and equal partnership.

Within this Framework, we have developed an extensive Joint EU/U.S. Action Plan. We will give special priority between now and our next Summit to the following actions:

## **PROMOTING PEACE AND STABILITY, DEMOCRACY AND DEVELOPMENT AROUND THE WORLD**

We pledge to work boldly and rapidly, together and with other partners, to implement the peace, to assist recovery of the war-ravaged regions of the former Yugoslavia and to support economic and political reform and new democratic institutions. We will cooperate to ensure: (1) respect for human rights, for the rights of minorities and for the rights of refugees and displaced persons, in particular the right of return; (2) respect for the work of the War Crimes Tribunal, established by the United Nations Security Council, in order to ensure international criminal accountability; (3) the establishment of a framework for free and fair elections in Bosnia-Herzegovina as soon as conditions permit and (4) the implementation of the agreed process for arms control, disarmament and confidence-building measures. While continuing to provide humanitarian assistance, we will contribute to the task of reconstruction, subject to the implementation of the provisions of the peace settlement plan, in the context of the widest possible burden-sharing with other donors and taking advantage of the experience of international institutions, of the European Commission and of all relevant bilateral donors in the coordination mechanism.

We will support the countries of Central and Eastern Europe in their efforts to restructure their economies and strengthen their democratic and market institutions. Their commitment to democratic systems of government, respect for minorities, human rights, market oriented economies and good relations with neighbours will facilitate their integration into our institutions. We are taking steps to intensify our cooperation aimed at sharing information, coordinating assistance programmes and developing common actions, protecting the environment and securing the safety of their nuclear power stations.



## Digital Repository Universitas Jember

We are determined to reinforce our cooperation to consolidate democracy and stability in Russia, Ukraine and other new independent states. We are committed to working with them in strengthening democratic institutions and market reforms, in protecting the environment, in securing the safety of their nuclear power stations and in promoting their integration into the international economy. An enduring and stable security framework for Europe must include these nations. We intend to continue building a close partnership with a democratic Russia. An independent, democratic, stable and nuclear weapons-free Ukraine will contribute to security and stability in Europe; we will cooperate to support Ukraine's democratic and economic reforms.

We will support the Turkish Government's efforts to strengthen democracy and advance economic reforms in order to promote Turkey's further integration into the transatlantic community.

We will work towards a resolution of the Cyprus question, taking into account the prospective accession of Cyprus to the European Union. We will support the UN Secretary General's Mission of Good Offices and encourage dialogue between and with the Cypriot communities.

We reaffirm our commitment to the achievement of a just, lasting and comprehensive peace in the Middle East. We will build on the recent successes in the Peace Process, including the bold steps taken by Jordan and Israel, through concerted efforts to support agreements already concluded and to expand the circle of peace. Noting the important milestone reached with the signing of the Israeli-Palestinian Interim Agreement, we will play an active role at the Conference for Economic Assistance to the Palestinians, will support the Palestinian elections and will work ambitiously to improve the access we both give to products from the West Bank and the Gaza Strip. We will encourage and support the regional parties in implementing the conclusions of the Amman Summit. We will also continue our efforts to promote peace between Israel, Lebanon and Syria. We will actively seek the dismantling of the Arab boycott of Israel.

We pledge to work together more closely in our preventive and crisis diplomacy; to respond effectively to humanitarian emergencies; to promote sustainable development and the building of democratic societies; and to support human rights.

We have agreed to coordinate, cooperate and act jointly in development and humanitarian assistance activities. To this end, we will establish a High-Level Consultative Group to review progress of existing efforts, to assess policies and priorities and to identify projects and regions for the further strengthening of cooperation.

We will increase cooperation in developing a blueprint for UN economic and social reform. We will cooperate to find urgently needed solutions to the financial crisis of the UN system. We are determined to keep our commitments, including our financial obligations. At the same time, the UN must direct its resources to the highest priorities and must reform in order to meet its fundamental goals.

We will provide support to the Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO), underscoring our shared desire to resolve important proliferation challenges throughout the world.

## II RESPONDING TO GLOBAL CHALLENGES

We are determined to take new steps in our common battle against the scourges of international crime, drug trafficking and terrorism. We commit ourselves to active, practical cooperation between the U.S. and the future European Police Office, EUROPOL. We will jointly support and contribute to ongoing training programmes and institutions for crime-fighting officials in Central and Eastern Europe, Russia, Ukraine, other new independent states and other parts of the globe.

We will work together to strengthen multilateral efforts to protect the global environment and to develop environmental policy strategies for sustainable world-wide growth. We will coordinate our negotiating positions on major global environmental issues, such as climate change, ozone layer depletion, persistent organic pollutants, desertification and erosion and contaminated soils. We are undertaking coordinated initiatives to disseminate environmental technologies and to reduce the public health risks from hazardous substances, in particular from exposure to lead. We will strengthen our bilateral cooperation on chemicals, biotechnology and air pollution issues.

We are committed to develop and implement an effective global early warning system and response



## Digital Repository Universitas Jember

network for new and re-emerging communicable diseases such as AIDS and the Ebola virus, and to increase training and professional exchanges in this area. Together, we call on other nations to join us in more effectively combating such diseases.

## II CONTRIBUTING TO THE EXPANSION OF WORLD TRADE AND CLOSER ECONOMIC RELATIONS

We have a special responsibility to strengthen the multilateral trading system, to support the World Trade Organisation and to lead the way in opening markets to trade and investment.

We will contribute to the expansion of world trade by fully implementing our Uruguay Round commitments, work for the completion of the unfinished business by the agreed timetables and encourage a successful and substantive outcome for the Singapore WTO Ministerial Meeting in December 1996. In this context we will explore the possibility of agreeing on a mutually satisfactory package of tariff reductions on industrial products, and we will consider which, if any, Uruguay Round obligations on tariffs can be implemented on an accelerated basis. In view of the importance of the information society, we are launching a specific exercise in order to attempt to conclude an information technology agreement.

We will work together for the successful conclusion of a Multilateral Agreement on Investment at the OECD that espouses strong principles on international investment liberalisation and protection. Meanwhile, we will work to develop discussion of the issue with our partners at the WTO. We will address in appropriate fora problems where trade intersects with concerns for the environment, internationally recognised labour standards and competition policy. We will cooperate in creating additional trading opportunities, bilaterally and throughout the world, in conformity with our WTO commitments.

Without detracting from our cooperation in multilateral fora, we will create a New Transatlantic Marketplace by progressively reducing or eliminating barriers that hinder the flow of goods, services and capital between us. We will carry out a joint study on ways of facilitating trade in goods and services and further reducing or eliminating tariff and non-tariff barriers.

We will strengthen regulatory cooperation, in particular by encouraging regulatory agencies to give a high priority to cooperation with their respective transatlantic counterparts, so as to address technical and non-tariff barriers to trade resulting from divergent regulatory processes. We aim to conclude an agreement on mutual recognition of conformity assessment (which includes certification and testing procedures) for certain sectors as soon as possible. We will continue the ongoing work in several sectors and identify others for further work.

We will endeavour to conclude by the end of 1996 a customs cooperation and mutual assistance agreement between the European Community and the U.S.

To allow our people to take full advantage of newly developed information technology and services, we will work toward the realisation of a Transatlantic Information Society.

Given the overarching importance of job creation, we pledge to cooperate in the follow-up to the Detroit Jobs Conference and to the G-7 Summit initiative. We look forward to further cooperation in the run up to the G-7 Jobs Conference in France, at the next G-7 Summit in the Summer of 1996 and in other fora such as the OECD. We will establish a joint working group on employment and labour-related issues.

## V BUILDING BRIDGES ACROSS THE ATLANTIC

We recognise the need to strengthen and broaden public support for our partnership. To that end, we will seek to deepen the commercial, social, cultural, scientific and educational ties among our people. We pledge to nurture in present and future generations the mutual understanding and sense of shared purpose that has been the hallmark of the post-war period.

We will not be able to achieve these ambitious goals without the backing of our respective business communities. We will support, and encourage the development of, the transatlantic business relationship, as an integral part of our wider efforts to strengthen our bilateral dialogue. The successful conference of EU and U.S. business leaders which took place in Seville on 10-11 November 1995 was an important step in this direction. A number of its recommendations have already been incorporated into our Action Plan and



will consider concrete follow-up to others.

will actively work to reach a new comprehensive EC-U.S. science and technology cooperation agreement by 1997.

we believe that the recent EC-U.S. Agreement on Cooperation in Education and Vocational Training can act as a catalyst for a broad spectrum of innovative cooperative activities of direct benefit to students and teachers. We will examine ways to increase private support for educational exchanges, including scholarship and internship programmes. We will work to introduce new technologies into classrooms, linking educational establishments in the EU with those in the U.S. and will encourage teaching of each other's languages, history and culture.

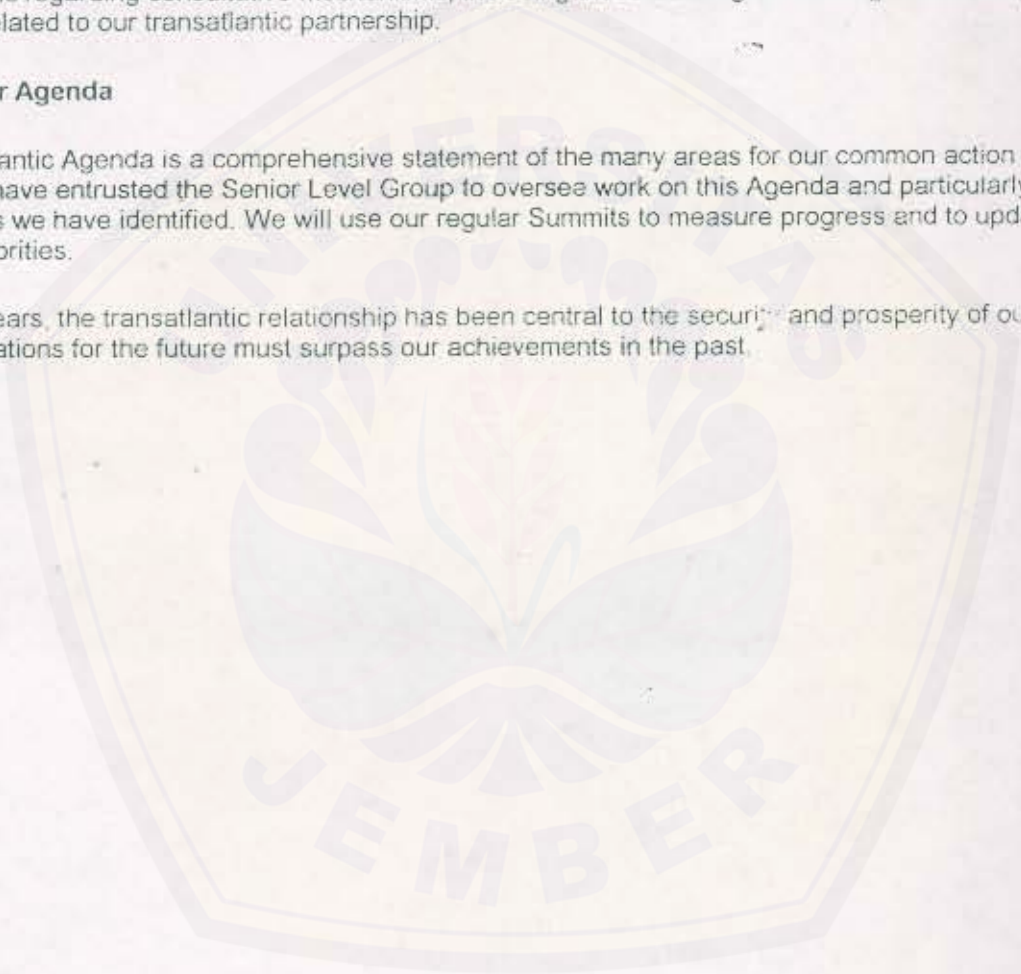
## Parliamentary links

We attach great importance to enhanced parliamentary links. We will consult parliamentary leaders on both sides of the Atlantic regarding consultative mechanisms, including those building on existing institutions, to discuss matters related to our transatlantic partnership.

## Implementing our Agenda

The New Transatlantic Agenda is a comprehensive statement of the many areas for our common action and cooperation. We have entrusted the Senior Level Group to oversee work on this Agenda and particularly the priority actions we have identified. We will use our regular Summits to measure progress and to update and revise our priorities.

For the last fifty years, the transatlantic relationship has been central to the security and prosperity of our people. Our aspirations for the future must surpass our achievements in the past.



## TRANSATLANTIC DECLARATION

The United States and the European Union (then the European Community) and its Member States adopted the following joint declaration on 22 November 1990:

The United States of America on one side and, on the other, the European Community and its Member States,

mindful of their common heritage and of their close historical, political, economic and cultural ties;

guided by their faith in the values of human dignity, intellectual freedom and civil liberties, and in the democratic institutions which have evolved on both sides of the Atlantic over the centuries;

recognizing that the transatlantic solidarity has been essential for the preservation of peace and freedom and for the development of free and prosperous economies as well as for the recent developments which have restored unity in Europe;

determined to help consolidate the new Europe, unimpeded and democratic;

resolved to strengthen security, economic cooperation and human rights in Europe in the framework of the OSCE and in other forums;

noting the firm commitment of the United States and the EC to the North Atlantic Alliance and to its principles and purposes;

acting on the basis of a pattern of cooperation proven over many decades and to be consolidated by strengthening and expanding this partnership on an equal footing, they will greatly contribute to continued stability, as well as to political and economic progress in Europe and the world;

aware of their shared responsibility not only to further common interests but also to face transnational challenges affecting the well-being of all mankind;

bearing in mind the accelerating process by which the European Community is acquiring its own identity in economic and monetary matters, in foreign policy and in the domain of security;

determined further to strengthen transatlantic solidarity, through the variety of their international relations;

have decided to endow their relationship with long-term perspectives.

### Common goals

The United States of America and the European Community and its Member States solemnly reaffirm their determination to strengthen their partnership further in order to:

support democracy, the rule of law and respect for human rights and individual liberty, and promote prosperity and social progress world-wide;

safeguard peace and promote international security, by cooperating with other nations against aggression and coercion, by contributing to the settlement of conflicts in the world and by reinforcing the role of the United Nations and other international organizations;

pursue policies aimed at achieving a sound world economy, marked by sustained economic growth with low inflation, a high level of employment, equitable social conditions, in a framework of international stability;

promote market principles, reject protectionism and expand, strengthen and further open the multilateral trading system;

carry out their resolve to help developing countries by all appropriate means in their efforts towards political and economic reforms.



# Digital Repository Universitas Jember

to provide adequate support to the academic staff of the State and organizations in the nations of Eastern and Central Europe, undertaking economic and technical relations and encourage their participation in the multilateral institutions of international trade and finance.

## Principles of US-EC partnership

To achieve their common goals, the European Community and its Member States and the United States of America will inform and consult each other on important matters of common interest, both political and economic, with a view to bringing their positions as close as possible, without prejudice to their respective independence, in appropriate international bodies. In particular, they will seek close cooperation.

The EC-US partnership will, moreover, greatly benefit from the mutual knowledge and understanding acquired through regular consultations as described in this declaration.

## Economic cooperation

Both sides recognize the importance of strengthening the multilateral trading system. They will support further steps towards liberalization, transparency, and the implementation of GATT and OECD principles concerning both trade in goods and services and investment.

They will further develop their dialogue, which is already underway, on other matters such as technical and non-tariff barriers to industrial and agricultural trade, services, competition policy, transportation policy, standards, telecommunications, high technology, and other related areas.

## Education, scientific and cultural cooperation

The partnership between the European Community and its Member States on the one hand, and the United States on the other, will be based on continuous efforts to strengthen mutual cooperation in various other fields which directly affect the present and future well-being of their citizens, such as exchanges and joint projects in science and technology, including *inter alia* research in medicine, environment protection, pollution prevention, energy, space, high-energy physics, and the safety of nuclear and other installations, as well as in education and culture, including academic and youth exchanges.

## Transnational challenges

The United States of America and the European Community and its Member States will fulfil their responsibility to address transnational challenges, in the interest of their own peoples and of the rest of the world. In particular, they will join their efforts in the following fields:

combating and preventing terrorism;

putting an end to the illegal production, trafficking and consumption of narcotics and related criminal activities, such as the laundering of money;

cooperating in the fight against international crime;

preventing the proliferation of nuclear weapons, chemical and biological weapons, and missile technology.

## Institutional framework for consultation

Both sides agree that a framework is required for regular and intensive consultation. They will make full use of and further strengthen existing procedures, including those established by the President of the European Council and the President of the United States on 27 February 1990, namely:

biannual consultations to be arranged in the United States and in Europe between, on the one side, the President of the European Council and the President of the Commission, and on the other side, the President of the United States;

biannual consultations between the European Community Foreign Ministers, with the Commission, and the

# Digital Repository Universitas Jember

The Secretary of State, the President of the European Community, the President of the Presidency, Foreign Ministers of the 'Troika' and the US Secretary of State.

annual consultations between the Commission and the US Government at cabinet level.

Both sides are resolved to develop and deepen these procedures for consultation so as to reflect the evolution of the European Community and of its relationship with the United States.

They welcome the actions taken by the European Parliament and the Congress of the United States in order to improve their dialogue and thereby bring closer together the peoples on both sides of the Atlantic.





## Transatlantic Relations - The U.S.-EU Partnership

- [U.S. Relations with the European Union](#)
- [U.S.-EU Summits and Other Meetings](#)
- [The President's European Trips](#)
- [U.S.-EU Agreements](#)
- [Events and Conferences](#)
- [Looking at the Big Picture \(Speeches & Statements\)](#)

## U.S. relations with the European Union

U.S. cooperation with the EU is based on the Transatlantic Declaration of 1990 and the New Transatlantic Agenda (NTA), adopted in 1995. This cooperation, which has been gradually deepened and broadened, takes place on several levels and includes summit meetings at the level of heads of state and government between the U.S., the European Commission and the country holding the EU Presidency.

Transatlantic cooperation builds on the strong community of interests between the US and EU member states. In addition, the flow of transatlantic trade and investments is the largest in the world and amounts to a value of up to a billion U.S. dollars every day. The EU and the U.S. together account for about 37% of the value of global trade in goods and about 45% of world trade in services.

## Establishing Diplomatic Relations

Diplomatic relations between the U.S. and the European Community were initiated in 1953 when the first US observers were sent to the European Coal and Steel Community. The [Delegation of the European Commission to the United States](#) in Washington, D.C. was established in 1954, and the [United States Mission to the European Communities](#), now the [United States Mission to the European Union](#), was established in 1961 in Brussels.

## Formalized Cooperation

In 1990, the relations of the U.S. with the European Community were formalized by the adoption of the **Transatlantic Declaration**. A regular political dialogue between the U.S. and the EC was thereby initiated at various levels, including regular summit meetings. The cooperation focused on the areas of economy, education, science and culture.

The **New Transatlantic Agenda (NTA)**, which was launched at the Madrid summit in 1995, carried the cooperation forward. The NTA contains four broad objectives for U.S.-EU collaboration:


- **Promoting peace and stability, democracy and development around the world:** including joint leadership in reconstruction in Bosnia-Herzegovina; promoting peace in the Middle East; helping Russia and the Central European countries in strengthening their democracies; acting jointly on humanitarian assistance and preventive diplomacy.
- **Responding to Global Challenges:** this includes cooperative efforts to combat

Dossiers



[Back & Forth](#)

DOSSIER

EU Sites


[Greek Council Presidency](#)

[External Relations](#)
[EU Relations with United States of America](#)
[U.S. Government Relations](#)
[State Department Bureau of European and Eurasian Affairs](#)

Related Sites


[Transatlantic Consumer Dialogue](#)


[Transatlantic Information](#)



## Digital Repository Universitas Jember

international crime and narcotics; a commitment to protect the environment by taking coordinated initiatives; a program to combat communicable diseases by setting up an early warning system.

- **Contributing to the expansion of world trade and closer economic relations:** the Agenda calls for supporting the World Trade Organization and strengthening the multilateral trade system to reduce or eliminate barriers to the flow of goods and services. The creation of a New Transatlantic Marketplace is intended to further liberalize transatlantic economic ties.
- **Building Bridges Across the Atlantic:** the Agenda seeks to expand commercial, cultural, educational and scientific exchanges to ensure public understanding of and support for the transatlantic relationship. The Transatlantic Business Dialogue is an early example of such links and is playing an important role in improving the flow of trade, investment, capital and technology across the Atlantic.



Transatlantic  
Environmental Dial

In connection with the adoption of the New Transatlantic Agenda a **Joint EU-U.S. Action Plan** was drawn up committing the EU and the U.S. to a large number of measures within the overall areas of cooperation. As an extension of the NTA efforts, agreement was reached at the 1998 London summit to intensify cooperation in the area of trade, which resulted in the **Transatlantic Economic Partnership (TEP)**. The TEP covers both bilateral and multilateral trade. Bilaterally, TEP addresses various types of obstacles to trade and strives to establish agreements on mutual recognition in the areas of goods and services. Furthermore, there is cooperation in the areas of public procurement and intellectual property law. Multilaterally, focus is on further liberalization of trade within the WTO in order to strengthen world trade. The interests of the business sector, the environment and the consumers are to be integrated into this work.

In building bridges across the Atlantic, a number of **people-to-people dialogues** have been set up. The goal is to enable individual actors to give their opinion. The idea is that the dialogues shall be involved in policy-making by presenting recommendations to governments on matters that concern them. In connection with each summit meeting time is set aside for meetings with representatives of one or more of these dialogues. The most advanced dialogue is the **Transatlantic Business Dialogue (TABD)**.

Another forum is the **Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)**. On December 4, 2001, leaders of TACD member organizations met in Washington, D.C. with U.S. and European Union officials. They discussed a wide range of issues affecting consumers in both the United States and the EU, including the launching in 2001 of a new round of global trade negotiations by the World Trade Organization. TACD participants engaged in detailed discussions in working groups that addressed e-commerce, food marketing and safety, trade, and intellectual property.

Other dialogues include the **Transatlantic Environmental Dialogue (TAED)**, and the **Transatlantic Legislators Dialogue (TALD)**.

### U.S.-EU Summits and Other Meetings

At the end of every other Council Presidency a summit meeting is held between the U.S. President, the Head of Government of the country holding the EU Presidency, and the President of the European Commission.



## Digital Repository Universitas Jember

Commerce meet the foreign and trade Ministers of the country holding the EU Presidency, together with the EU Commissioners for foreign affairs and trade. The High Representative for the EU's Common Foreign and Security Policy also participates in these talks.

December 18, 2002	<a href="#">Washington Ministerial, Danish Pres. Website</a>
May 2, 2002	<a href="#">Washington Summit, Spanish Pres. Website</a>
December 2001	<a href="#">Belgian Presidency Website</a>
June 14, 2001	<a href="#">Goteborg Summit, Swedish Presidency</a>
December 18, 2000	<a href="#">Washington Summit, French Presidency</a>
May 31, 2000	<a href="#">Queluz Summit, Portuguese Presidency</a>
December 17, 1999	<a href="#">Washington Summit, Finnish Presidency</a>
June 21, 1999	<a href="#">Bonn Summit, German Presidency</a>
December 18, 1998	<a href="#">Washington Summit, Austrian Pres. Website</a>
May 18, 1998	<a href="#">London Summit, U.K. Pres. Website</a>
December 5, 1997	<a href="#">Washington Summit, Luxembourg Presidency</a>

### Transatlantic Meetings

A great number of other meetings are held between representatives from the U.S. and the EU during each EU Presidency at various levels within the framework of the transatlantic cooperation.

### The Task Force

This group of officials from the U.S., the EU Presidency, and the Commission plays a key role within the NTA in identifying and dealing with all aspects of transatlantic cooperation. It also decides which issues should be passed on for attention at higher level. The Task Force usually meets three times during each Presidency.

### The Senior Level Group (SLG)

The SLG, which consists of high-level officials from the U.S., the EU Presidency, and the Commission, prepares the summit meeting. The group monitors the work within the Task Force and attempts to solve the problems referred to it by the Task Force. The SLG reports on recent progress to the summit meeting and sets the priorities for the coming year. This is done in the so-called Senior Level Group report.

### Meetings of Experts

Meetings of the U.S., the Commission and the troika, comprised of representatives of the current and incoming Presidencies together with representatives of the Council Secretariat, are held at expert level once during each Presidency within a large number of working groups on different issues. Examples of working groups are those for the Western Balkans, UN issues, human rights and security policy issues.

### Meetings of Political Directors

The US meets with the Commission and with Political Directors of the current and incoming EU Presidency and the Council Secretariat (the troika) once during each EU Presidency. Neither the expert meetings nor the meetings of Political Directors formally takes place under the NTA.

### Meetings of Foreign Ministers

The U.S. Secretary of State, the Foreign Minister of the country holding the EU Presidency, the EU External Relations Commissioner and the Secretary General of the EU Council Secretariat/the High Representative meet twice every EU Presidency period. Apart from the talks in connection with the summit meeting they also hold a separate meeting, usually at the beginning of the EU Presidency period.



## Digital Repository Universitas Jember

### The President's European Trips

- [Powell Outlines Highlights of Bush Trip to Europe, May 28, 2002](#)
- [Presidents Bush, Chirac Hold "Intense, Candid, Friendly" Talks, May 26, 2002](#)
- [Historic, Hopeful Day, Says Bush After Signing Pacts with Putin, May 24, 2002](#)
- [Bush Urges New NATO Strategy, Capabilities to Defeat Terror, May 23, 2002](#)
- [Bush, Schroeder Say No Concrete Plans to Attack Iraq, May 23, 2002](#)
- ["Much to Celebrate," Powell Says on Arrival in Berlin, May 22, 2002](#)
- [Bush Optimistic About U.S. Relations, Cooperation with Europe, May 21, 2002](#)
- [Administration Official Briefs on Upcoming Bush Trip to Europe, May 16, 2002](#)

### U.S.-EU Agreements

- [Implementing Arrangement in Non-Nuclear Energy Research, May 14, 2001](#)
- [Umbrella Agreement with EURATOM, May 14, 2001](#)
- [U.S.-European Union Agreement on Bananas, April 11, 2001](#)
- [NIST and EU Research DG Sign Agreement on Metrology and Measurement Standards, Oct. 5, 1999](#)
- [U.S. and EU to sign Veterinary Equivalency Agreement, July 20, 1999](#)
- [United States and Europe to Build Advanced Telescope, June 10, 1999](#)
- [Agreement on Global Technical Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts, June 25, 1998](#)
- [Agreement on the Application of Positive Comity Principles in the Enforcement of Competition Laws, June 4, 1998](#)
- [U.S.-EU Mutual Recognition Agreement \(MRA\), Dec. 1, 1998](#)
- [Agreement on Drug Precursors, May 29, 1997](#)
- [Science and Technology Agreement, Dec. 5, 1997](#)
- [Customs Cooperation and Mutual Administrative Assistance Agreement May, 28, 1997](#)

### Looking at the Big Picture (Speeches & Statements)

- [Solana: Mars & Venus & a New Era for Transatlantic Relations, Apr. 7, 2003](#)
- [State's Larson on Transatlantic Relations, Mar. 27, 2003](#)
- [U.S. Official Says Ties to Europe Remain Strong, Mar. 13, 2003](#)
- [Treasury Reviews Scope of U.S.-EU Economic Relations, Feb. 13, 2003](#)
- [U.S.-EU Economic Relationship More Partnership Than Conflict, Dec. 9, 2002](#)
- [U.S. Welcomes Greece EU Presidency Priorities, Dec. 6, 2002](#)
- [U.S.-EU Partnership Must Adjust to New Era, U.S. Officials Say, Dec. 3, 2002](#)



## Digital Repository Universitas Jember

2002

- [State's Boucher on U.S. Foreign Policy, EU, NATO, Iraq, Nov. 28, 2002](#)
- [State Department's Ries on the Transatlantic Partnership, Nov. 14, 2002](#)
- [EP President Cox at the National Press Club, July 10, 2002](#)

---

[Archives 1997-1999](#) | [Archives 1999-2000](#) | [Archives 2001](#) | [All Issues & Dossiers](#) | [Return to Home](#)



The strong links across the Atlantic between Germany and the United States encompass trade, security, the pursuit of peace and democracy. The United States is Germany's closest ally and partner outside the European Union. The European Union and the United States are the most important partners in a transatlantic relationship based on vital mutual interests and values. We share a deep commitment to the advancement of democracy and human rights around the world. Leaders of Germany and the United States meet bilaterally in the context of meetings that bring world leaders together, like the annual G-8 Summits and UN General Assemblies.

*Experience has taught us that, when the EU and U.S. work hand-in-hand, either bilaterally or multilaterally, we can be an engine for positive global change, nurturing the development of democratic regimes, opening trade and investment, and to reduce poverty, and protecting the environment.*

From the Göteborg Statement: Summit of the European Union and the United States of America. June 14, 2001

Some facts about the ties that link the peoples of Germany and the Europe with those of the United States:

#### Travel & Communication

- 500,000 airline passengers cross the Atlantic every day.
- People in Europe and North America exchange 1 million phone calls a day.
- Email messages between the two continents number 1.4 billion a day.
- US travelers spent approximately \$1.7 billion in Germany in 2000 (out of a total \$18.7 billion spent by foreign travel in Germany).
- US travelers rank second only to visitors from the Netherlands in terms of overnight stays in Germany.
- In eastern Germany, more travelers come from the United States than any other country.

#### Jobs & Investment

- German companies are responsible for roughly 700,000 jobs in the US, and US companies have created roughly the same number of jobs in Germany.
- German investments in the US total about \$35 billion.
- About 20 percent of German foreign direct investment goes to the US.
- About 10 percent of US investments in Germany are in the new federal states, making the US the largest investor in Germany.
- 46 % of US direct investment abroad was in the countries of the EU as of 2000.
- EU countries accounted for more than 60 % of foreign direct investment in the US as of 1999.

#### Germany-US Trade

The US remains the second largest market, behind France, for German exports. And the US is the third largest importer, behind the Netherlands, of goods into Germany.

- 3.75 % of US exports went to Germany in 2000 4.8 % of US imports came from Germany.
- 10.3 % of German exports went to the US in 2000 8.5 % of German imports came from the US

#### EU-US Trade

- At \$1 billion a day in transatlantic trade and investment flows, the EU and the US have the largest bilateral trading relationship in the world.
- Together the EU and the US account for roughly half the entire world economy.
- The US is the top destination for EU exports and the top source of imports into the EU.
- 24.8 % of EU exports went to the US in 2000 19.2% of EU imports came from the US
- 21% of US exports came from the EU in 2000 18 % of US imports went to the EU
- The Transatlantic Business Dialogue is an informal process through which European and American companies and business associations develop joint recommendations for EU-US trade policy, working together with the European Commission administration. See the TABD homepage for more information, including its 2001 Mid-Year Report.

#### People

Numerous public and private exchange programs support students, researchers, professionals and other individuals.

#### Students

- Europe is the most popular destination for US students studying abroad. In the 1998/1999 academic year, 68% (more than half) of US students who studied abroad went to Europe.
- Europe ranks second behind Asia in the number of students studying in the US. Europeans made up 15% of foreign students in the US.



institutions in the 1999/2000 academic year.

- Germany is among the top 10 destinations for US students studying abroad, attracting 4,534 students, 3.5% of all US students studying abroad, in the 1998/1999 academic year.

## Scholars

- Germany sends more scholars to US academic institutions than any other European country and ranks third behind the UK and France in the number of scholars in the US. In the 1999/2000 academic year, 5,016 German scholars (6.7% of all foreign scholars in the US) were at US institutions.
- Europeans make up 36% of foreign scholars in the US with 27,214 Europeans at US institutions in 1999/2000. Germany sends more scholars to the US. Programs
- The German-American Fulbright Program, funded by both governments, is the largest in the overall Fulbright program. Each year an average of 700 US and German students, scholars, teachers, administrators and journalists participate. The German Foreign Minister and the US Ambassador to Germany serve as honorary chairmen of the board of the Fulbright Commission.
- Arthur F. Burns Fellowship Program sponsors journalists from the US and Germany.
- Congress-Bundestag Youth Exchange sponsors high school students and young professionals from both countries.
- Robert Bosch Foundation provides fellowships for professionals and young leaders from the US to Germany and vice versa through programs in the US.

Sources: German Federal Statistical Office, European Union, German National Tourist Office, Bureau of Economic Analysis (Department of Commerce), Institute of International Education, German American Fulbright Commission.



- [Transatlantic Dialogue](#)
  - [Joint EU-US Action Plan](#)
  - [Transatlantic Dialogue](#)
  - [Communication from the Commission to the Council](#)  
COM(2001) 154, March 20, 2001 (pdf)
  - [Transatlantic Dialogue](#)
  - [Transatlantic Dialogue; TACD website](#)
  - [Transatlantic Dialogue](#)
  - [Transatlantic Dialogue](#)
  - [Transatlantic Dialogue](#)
  - [The New Transatlantic Marketplace: Communication from the European Commission](#)
  - [EU-US Reports;](#)
  - [EC-US Task Force on Research](#)
- :
- [EC-US Agreement on the Application of the GATT Agreement on Trade in Civil Aircraft](#) on Trade in Large Civil Aircraft
  - [EU/US Consultative Forum](#)
  - [EC/US Agreements, Reports and Related Documents Regarding the Application of Their Laws](#)
  - [EC-US Agreement](#)
  - [- Commission Decision of 25 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the privacy principles and related frequently asked questions issued by the US Department of Commerce \(notified under document number C\(2000\) 2441\) \(1\) \(pdf document\)](#)
  - [EC-US Agreement on](#)
  - [EC-US Cooperation in Higher and Vocational Education and Training, Proposal for a Council Decision concerning the signature of the Agreement between the European Community and the United States of America renewing the co-operation programme in higher education and vocational education and training](#)
  - [Agreement for cooperation between the European Atomic Energy Community represented by the Commission and the Department of Energy of the United States of America in the field of fusion research and development \(pdf document\)](#)
  - [EU/US Agreement on](#)
  - [EC-US Agreement on \(MRA\)](#)
  - [EC-US MRA Overview & Useful Links](#)
  - [EC-US Agreement for](#)
  - [Joint Statement on](#)
  - [Council Regulation \(EC\) No. 382/2001 of 26 February 2001 Concerning the Implementation of Between the European Union and the Industrialised Countries of North America, the Far East and Australasia](#)



## EU's relations with the United States of America

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

## Overview

## Latest news:

- [Fuel cells agreement- EU and US forge links to provide sustainable energy sources for the future](#) 16/06/03
- [EU-US relations - Renew Commitment to Trans-Atlantic Business Dialogue](#) 29/04/03

- [Introduction](#)
- [Diplomatic Relations](#)
- [Transatlantic Cooperation](#)
- [Facts & figures](#)
- [Other background documents](#)

11 September attacks: one year after

en	de	es	fr	it	nl	pt	tr	sv
----	----	----	----	----	----	----	----	----

## Introduction

The European Union and the United States are the two largest economies in the world. They account together for about half the entire world economy. The EU and the US have also the biggest bilateral trading and investment relationship. Transatlantic flows of trade and investment amount to around \$1 billion a day, and jointly, our global trade accounts for almost 40 % of world trade. By working together, the US and the EU can promote their common goals and interests in the world much more effectively.

## Diplomatic Relations

The United States has maintained diplomatic relations with the European Union and its forerunners since 1953, when the first US Observers to the European Defence Community and the European Coal and Steel Community were nominated. In 1961, the US Mission to the European Communities - now the European Union - was established. The European Commission is represented in the United States by a Delegation in Washington, which was established in 1954 largely thanks to the work of the then President of the ECSC, Jean Monnet. A New York office, accredited as observer to the United Nations, was established in 1964. In 1971 the Washington office became a Delegation with full diplomatic privileges and immunities. The Delegation represents the European Commission in its dealings with the US government. It reports on US developments to headquarters in Brussels and acts as a liaison with other international institutions in Washington, DC.

## Transatlantic Cooperation

The landmarks in EU-US relations in recent years are the Transatlantic Declaration, the New Transatlantic Agenda and the Transatlantic Economic Partnership. The [Transatlantic Declaration](#) was adopted by the US and the EU in 1990. It laid down the principles for greater EU-US cooperation and consultation. Cooperation in the fields of economy (liberalization, OECD, competition policy etc.), education, science and culture, and transnational challenges was established. A machinery of biannual summits and ministerial meetings, ad hoc Troika/Presidency meetings with the Secretary of State, and briefings on European Political Cooperation (now CFSP) was set up in the Declaration.

In 1995 the [New Transatlantic Agenda \(NTA\)](#) and the [EU-US Joint Action Plan](#) was adopted. The NTA and the Action Plan provide a framework for EU-US partnership and cooperation across a wide range of activities under four broad chapters: promoting peace and stability, democracy, and development around the world; responding to global changes; contributing to the expansion of world trade and fostering closer ties; building bridges across the Atlantic.

In the area of [promoting peace and stability](#) the EU and the US are working together in areas such as the former Yugoslavia and in the Middle East Peace Process. The chapter on response to [global challenges](#) covers cooperation in fields such as environment protection, the protection of public health and law enforcement issues. In the [economic area](#) the EU and the US mostly work together within the framework of the Transatlantic Economic Partnership and under the multilateral umbrella of the WTO. In [building bridges over the Atlantic](#) a number of dialogues have been established. The aim of the dialogues is to work together on the level of civil society. There are a [transatlantic business dialogue](#), a [transatlantic labor dialogue](#), a [consumer dialogue](#), an [environmental dialogue](#) and also the EPIUS Congress and Senate legislative dialogue. Other important projects such as the [EU Centers in the US](#) are also included under this chapter.

Significant progress has been made since 1995, i.e. with the signature at the EU-US Summit of May 1997 of the [Agreement on Custom Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters](#); the entering into force on 1 December 1998 of the [Mutual Recognition Agreement](#) covering specific goods areas (telecom equipment, pharmaceuticals, medical devices, electromagnetic compatibility, electric safety, and recreational craft); the [EU-US Veterinary Equivalence Agreement](#) aimed at facilitating trade in live



animals and animal products and signed on 20 July 1990, the signature on 4 June 1998 of the EU-US Agreement on the application of positive comity principles in the enforcement of their competition laws. The GATT and GATS Uruguay Round Agreement signed on 15 December 1997 will extend and strengthen the conduct of cooperative activities between EU scientific institutions and a range of US government research agencies.

The EU and the US launched the Transatlantic Economic Partnership (TEP) at the London summit in May 1998. The TEP is an extension of the approach taken in the NTA. It includes both multilateral and bilateral elements. Bilaterally the purpose is to tackle technical barriers to trade. The purpose of the second part is to stimulate further multilateral liberalization – by joining forces on international trade issues. An innovative aspect of the proposal is to integrate labor, business, environmental and consumer issues into the process. It is however too early to say what will come out of this partnership.

In the Bonn Declaration adopted at the 21 June 1999 EU-US summit in Bonn, both sides committed themselves to a "full and equal partnership" in economic, political and security affairs. This explicit recognition is a step forward from the NTA. The Bonn Declaration outlines how the EU and the US want to shape their relationship over the next decade and is embedded in the NTA process.

## Facts and Figures

### The EU and US - economic and trade indicators 1999

	EU	US
Population (million)	376	273
Area (1000 km <sup>2</sup> )	3 236	9 809
Population density (inhabitants per km <sup>2</sup> )	115	29
GDP (billion Euro)	7 809	8 729
GDP per capita (Euro)	20 800	31 987
Trade in goods and services (billion Euro)		
Total exports	988	862
Total imports	952	1 132
Balance	36	- 270
Exports as share of total world exports	20%	18%
Imports as share of total world imports	19%	22%

Sources: Eurostat, IMF, WTO

Sources: Eurostat, IMF, WTO

### Bilateral EU-US trade in goods (billion ECU/Euro)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
EU exports to the US						
Value	103	114	141	161	183	232
% change year on year	-0,4%	10,7%	23,5%	14%	13,6%	26,5%
EU imports from the US						
Value	104	113	138	152	161	196
% change year on year	3,6%	8,9%	21,6%	10,3%	5,6%	22,1%
Trade balance						
Value	-1	1	3	9	22	36



# Digital Repository Universitas Jember

Bilateral EU-US trade in services (billion ECU/Euro)

	1995	1996	1997	1998	1999
<b>EU exports to the US</b>					
Value	60	64	78	77	85
% change year on year	-6,9%	7,2%	17,9%	-1,3%	9,4%
<b>EU imports from the US</b>					
Value	56	63	73	77	91
% change year on year	-2,5%	8,4%	13,6%	5,2%	15,3%
<b>Trade balance</b>					
Value	2	1	5	0	-6

Source: Eurostat

## Main destination of EU exports of goods (1999)

	Partner	% of total EU-exports
1	USA	24,1
2	Switzerland	8,2
3	Japan	4,7
4	Poland	3,8
5	Norway	3,1
6	Turkey	2,7
7	China	2,5
8	Hungary	2,5
9	Czech Rep.	2,4
10	Canada	2,2

Source: Eurostat

## Main origin of EU imports of goods (1999)

	Partner	% of total EU-imports
1	USA	20,5
2	Japan	9,1
3	Switzerland	6,8
4	China	6,4
5	Norway	3,8
6	Russia	3,4
7	Taiwan	2,6
8	South Korea	2,3

9	Poland	2,3
10	Hungary	2,2

Bilateral Foreign Direct Investment (flows, billion ECU/Euro)

	1995	1996	1997	1998	1999	Average 1994- 1999
<b>US FDI into the EU</b>						
Value	24	20	21	61	75	40
as % of FDI into the EU	65%	63%	54%	57%	65%	61%
<b>EU FDI into the US</b>						
Value	25	17	48	133	197	84
as % of EU FDI abroad	54%	36%	44%	60%	66%	52%

Source: Eurostat

Foreign Direct Investment (stocks, billion Euro, 1999)

	US in the EU	EU in the US
FDI Stocks	399	597

Direct Investment Positions (in percentages, 1999)

US stock in the EU	as % of total US DI abroad 45,2%	as % of DI in the EU from abroad 56,2%
EU stock in the US	as % of DI in the US from abroad 60,5%	as % of total EU DI abroad 53,5%

Sources: Eurostat and US DoC BCA.

Other background documents


- The New Transatlantic Marketplace  
Communication of Sir Leon Brittan, Mr Bangemann and Mr Monti, 11 March 1993



EU Newsweb

- EU News and Press
- Index of EU Websites
- EU Basics
- Law & Policy Overviews
- Member Countries
- Offices & Services in the US
- Research Tools
- US Partnership
- For Young People
- Queries Comments
- Contact
- Map
- IT/ITP

EU Home (Profile of the EU)

 Facts and Figures

## Facts and Figures on the European Union and the United States

- [Data from the European Commission External Relations Directorate General](#)
- [Data from the European Commission Trade Directorate General](#) (Excel file)
- [EU Statistical Office - EUROSTAT: Indicators; EU Candidate Countries Facts & Figures; Homepage](#)

European Union  
 Mission of the European  
 Commission to the United  
 States  
 1100 M Street, NW  
 Washington, DC 20037  
 Telephone: (202) 862-9500  
 Fax: (202) 429-1766

### Additional Data

Basic Statistics 2001		
	EU-15	US
Area, 1,000 Square Miles	1,249.0	3,717.9
Population (Millions)	378.0	284.8
Population Density/Square Mile	302.6	76.6
Unemployment Rate %	7.4	4.8
Gross Domestic Product (Billions \$)	7894.5	10208.0
GDP (Volume) % Increase 2001/2000	.5	1.7
Inflation (GDP Price Deflator %)	2.4	2.4

Source: Eurostat, OECD, Economic & Financial Affairs DG

World Trade 2001 (Excluding Intra-EU Trade)—Billions USD				
	Imports	%	Exports	%
Total	5017.3	-	4745.0	-
EU-15	914.0	18.2	872.5	18.4
US	1180.5	23.5	730.9	15.4

Source: WTO estimates

US Trade 2001—Billions USD

	Imports	%	Exports	%
World	174.0	—	128.1	—
EU-15	220.0	19.3	159.2	21.6

Source: US Department of Commerce

EU-15 Trade 2001—Billions US\$				
	Imports	%	Exports	%
World	943.4	—	900.4	—
US	179.2	19.0	219.6	24.4

Source: Trade Directorate General (DG)

Trade as % of GDP 2001		
	Imports	Exports
Eurozone	29.5	30.3
US	12.8	8.0

Source: OECD

Investment 2001—Billions USD	
EU-15 Direct Investment in the US	805.3
US Direct Investment in the EU-15	640.8

Source: US Department of Commerce

Sources:

- European Commission – Statistical Office (Eurostat).
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
- European Commission – Economic and Financial Affairs Directorate General (DG).
- World Trade Organization (WTO).
- US Department of Commerce.
- European Commission – Trade Directorate General (DG).
- European Commission – Statistical Office (Eurostat). New Cronos database.

- 
- [More EU/US Data](#)
  - [The EU and the 50 US States](#)
- 

### Landmarks in EU-US Cooperation

EU-US cooperation and partnership have grown and intensified steadily since the earliest days of European integration, when the US was the first country to accredit a diplomatic representation to the European Coal and Steel Community (ECSC) in 1952 and the European Economic Community (EEC) and European Atomic Energy Community (Euratom) in 1958. Important landmarks in recent years include:



- 1990 The EU and the US adopt a Transatlantic Declaration laying down the principles for greater EU-US consultation and cooperation.
- 1995 The EU and US agree on a New Transatlantic Agenda (NTA) and Action Plan to promote cooperation, partnership and joint action in areas ranging from trade liberalization to security.

The NTA and Action Plan provide a framework for EU-US partnership and cooperation across a wide range of activities, under four broad "chapters":

- promoting peace and stability, democracy and development around the world;
- responding to global challenges; contributing to the expansion of world trade and closer economic relations;
- building bridges across the Atlantic.

## SELECTED AREAS OF COOPERATION

- 1958 Peaceful use of nuclear energy  
1974 Environment  
1979 Workers health and safety  
1982 Renewable energy sources  
1984 Fisheries  
1986 Radiation protection  
1986 Controlled thermonuclear fusion  
1990 Biotechnology  
1991 Competition and anti-trust  
1995 Higher education and vocational training  
1997+ Agreements on customs cooperation, mutual recognition of testing and certification in certain product areas, control of precursor chemicals used in illicit drugs manufacture and science and technology.

## EU-US MEETINGS

- Annual consultations among the Presidents of the United States, the European Council and the Commission;
- Annual consultations among the US Secretary of State, the EU Presidency Foreign Minister and the Commission;
- Annual EU-US consultations between the European Commission and the US Government at sub-cabinet level;
- Senior Level Group consultations 4-6 times a year, to prepare annual summits;
- NTA Task Force meetings (frequent) to coordinate action under the NTA for the Senior Level Group and Summit leaders;
- Working Groups of EU representatives with their US counterparts to discuss a wide range of foreign policy issues.

For further information about EU-US Relations, visit the External Relations Directorate General and the Trade Directorate General.

